

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA DESA  
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN DI  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2020**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

**HANI'ATUL DHIKRIYAH**

**NIM 1705026161**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

## NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

Nomor : B-1171/Un.10.5/D.1/PP.00.9/03/2020

31 Maret 2020

Lamp :-

Hal : Penunjukan menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :  
Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Uin Walisongo

Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Hani'atul Dhikriyah  
NIM : 1705026161  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020

Maka, kami berharap kesediaannya Saudara untuk menjadi pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai pembimbing II Saudara/I Heny Yuningrum, SE., M.Si.

Demikian, ataskesediaan Saudaradiucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 1 (satu) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Hani'atul Dhikriyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

di- Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Hani'atul Dhikriyah

NIM : 1705026161

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi: **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN  
DANA DESA TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2017-2020"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat  
segera dimunaqosyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 23 November 2021

Pembimbing I,

**Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si**  
NIP. 197905122005012004

Pembimbing II,

**Heny Yuningrum, SE., M.Si**  
NIP. 198106092007102005

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185 Telp./Fax : (024) 7608454  
Website : www.febi.walisongo.ac.id Email : febi@walisongo.ac.id

### HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Hani'atul Dhikriyah  
NIM : 1705026161  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal :

**22 Desember 2021**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu Ekonomi Islam tahun 2021.

Semarang, 22 Desember 2021

Mengetahui,

Ketua Sidang

**Mashilal, SEI, M. Si**  
NIP. 19840516 201903 1 005

Sekretaris Sidang

**Heny Yuningrum, S.E., M.Si**  
NIP. 19810609 200710 2 005

Penguji Utama I

**Mardiyaturrositaningsih, S.E., S.H., M.Si**  
NIP. 19930311 201903 2 020

Penguji Utama II

**Septiana Na'afi, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19890924 201903 2 018

Pembimbing I

**Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si**  
NIP. 19790512 200501 2 004



Pembimbing II

**Heny Yuningrum, S.E., M.Si**  
NIP. 19810609 200710 2 005

## **MOTTO**

*“Sometimes life doesn’t give you what you want, not because you don’t deserve it,  
but because you deserve so much more.”*

## **PERSEMBAHAN**

Sebagai tanda bakti dan terima kasih, skripsi ini saya dedikasikan kepada :

### **Kedua Orang Tua tercinta**

Terima kasih yang tiada batas dari putri kecil bapak dan ibu untuk segalanya. Teruntuk bapak tersayang, terima kasih untuk seluruh kasih sayang serta tetesan keringat yang telah bapak berikan untuk masa depan putrimu. Sosok pahlawan yang selalu mengutamakan pendidikan anak-anaknya ditengah keterbatasan dan kesederhanaan. Teruntuk ibu tercinta, terima kasih yang tiada habisnya saya sampaikan atas kasih sayang, dukungan, dan do'a yang senantiasa mengiringi putrimu. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan nikmat dan rahmat serta kesehatan dan umur panjang kepada ibu dan bapak.

## DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 5 Oktober 2021



Hani'atul Dhikriyah  
NIM. 1705026161

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin ini sangat diperlukan untuk memudahkan pembaca dikarenakan dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang ditulis dalam bahasa arab. Adapun pedoman transliterasi arab latin ini didasarkan pada keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987.

### A. Konsonan

Tabel di bawah ini memperlihatkan daftar huruf Arab dan transliterasinya yang ditulis dalam huruf latin.

ء = ,,	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ,,	ى = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal Tunggal (Monoftong)

َ = A

ِ = I

ُ = U

### C. Vokal Rangkap (Diftong)

اي = AY

او = AW

### D. Syaddah ( - )



Tasydid atau Syahadah dilambangkan dengan pengulangan huruf konsonan ganda

Seperti : الطَّبّ Al-Thib.

**E. Kata Sandang (...ال)**

Huruf sandang (...ال) yang dibaca al, ditulis secara terpisah dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh : الصناعة = al-shina'ah.

## **ABSTRAK**

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi Sumber Daya Manusia yang besar, Pendapatan Asli Daerah yang memadai, serta penerimaan Dana Desa yang besar. Namun potensi tersebut tidak diimbangi dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dana Desa diperoleh dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Jawa Tengah. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia didapat dari Badan Pusat Statistik.

Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa secara Bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

**Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Desa.**

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmat, hidayah, dan inayahnya hingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga, kerabat, dan umatnya.

Dalam proses penyusunan skripsi tentunya penulis tidak lepas dari kesulitan dan hambatan. Namun berkat do'a, motivasi, dan nasehat dari seluruh pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Abdul Manan dan Ibu Rosadah. Terima kasih yang tiada habisnya saya sampaikan atas kasih cinta, dukungan, serta do'a yang senantiasa mengiringi putrimu.
2. Kakak tercinta Muhammad Nadhif. Terimakasih atas dukungan baik moral maupun material. Semoga kita tetap saling mendukung dan mengasihi satu sama lain.
3. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
4. Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag. selaku Dekan serta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag. selaku kepala Jurusan Ekonomi Islam dan Nurudin selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
6. Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Heny Yuningrum, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi,

7. Mohammad Nadzir, SHI., M.Si. (Alm) selaku Wali Dosen yang selalu senantiasa memberikan arahan dan motivasi selama proses studi di UIN Walisongo Semarang.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses studi di UIN Walisongo Semarang.
9. Untuk sahabat-sahabat tercinta, Fina Ulliya, Dzakiyyah Nur N.F, dan seluruh kawan-kawan yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Terima kasih atas dan motivasi dan dorongan semangat yang teman-teman berikan.
10. Untuk teman-teman seperjuangan EI-D17 dan keluarga besar ekonomi islam 2017 yang telah menemani berjuang dalam proses studi.
11. Rekan-rekan KKN RDR Kelompok 30. Terimakasih atas pengalaman yang berharga dalam masa bakti kita.
12. Sedulur-sedulur Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE). Terima kasih telah memberikan pengalaman dalam organisasi dan pengabdian kepada masyarakat.

Penulis menyadari bahwa ketidak sempurnaan terhadap penyusunan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yng membangun senantiasa penulis harapkan dari pembaca skripsi ini. Semoga bermanfaat. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin.*

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Desentralisasi fiskal.....	13
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	15

2.3 Dana Desa (DD) .....	18
2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	19
2.5 Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam .....	23
2.6 Penelitian Terdahulu.....	28
2.7 Kerangka Pemikiran Teoritik .....	30
2.8 Hipotesis Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.2 Populasi dan Sampel .....	34
3.3 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel .....	37
3.4 Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	44
4.2 Statistik Deskriptif .....	45
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	46
4.3.1 Uji Normalitas.....	46
4.3.2 Uji Multikolinieritas .....	50
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	51
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	52
4.4 Metode Pengumpulan Data .....	54
4.5 Uji Regresi Berganda .....	54
4.6 Pengujian Hipotesis .....	56
4.6.1 Uji Simultan (Uji Statistik F).....	56
4.6.2 Uji Parsial (Uji Statistik T) .....	58
4.7 Koefisien Determinasi .....	60

4.8 Interpretasi Hasil Penelitian .....	60
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	65
5.3 Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN.....	73

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 10 Provinsi di Indonesia dengan Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi Tahun 2020.....	2
Tabel 3. 1 Teknik Pengambilan Sampel .....	35
Tabel 3. 2 Sampel Penelitian.....	36
Tabel 3. 3 Variabel, Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian.....	37
Tabel 3. 4 Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi.....	40
Tabel 4. 1 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah .....	44
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	45
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas .....	49
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	50
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	52
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi .....	53
Tabel 4. 7 Hasil Uji Cochrane-Orcutt.....	53
Tabel 4. 8 Hasil Uji Regresi Berganda.....	55
Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik F.....	57
Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik T.....	58
Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinansi.....	60



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Capaian Indeks Pembangunan Manusia.....	3
Gambar 1. 2 Perbandingan IPM Nasional dan IPM Jawa Tengah.....	3
Gambar 1. 3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi jawa Tengah..	5
Gambar 1. 4 Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.....	5
Gambar 1. 5 Dana Desa .....	7
Gambar 2. 1 Skema Pengelolaan Dana Desa .....	19
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Teoritik .....	30
Gambar 4. 1 Hasil Uji Grafik Histogram .....	47
Gambar 4. 2 Hasil Uji Grafik P-Plot.....	48
Gambar 4. 3 Hasil Uji Grafik Scatterplot .....	51
Gambar 4. 4 Kurva F.....	57
Gambar 4. 5 Kurva T Variabel Pendapatan Asli Daerah.....	59
Gambar 4. 6 Kurva T Variabel Dana Desa .....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Tabulasi Data.....	73
Lampiran 2. Tabel DW-test, T-test & F-test .....	77
Lampiran 3. Hasil Uji Statistik.....	80
Lampiran 4. Persetujuan Penelitian.....	86
Lampiran 5. Biodata Mahasiswa.....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peran Sumber Daya Manusia bagi suatu negara sangat strategis. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor utama yang tidak boleh dipandang sebelah mata untuk mencapai tujuan negara. Manusia atau dalam hal ini adalah rakyat menjadi kunci penggerak bagi masa depan suatu negara. Pembangunan manusia menjadikan manusia sebagai ujung tombak dan tujuan akhir dari pembangunan yang ingin dicapai, bukan menjadikan manusia sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan nasional selayaknya juga sejalan dengan pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik sandang, pangan, maupun tempat tinggal. Salah satu cara untuk mengukur pengelolaan otonomi daerah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melihat capaian Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki wilayah tersebut. Pembangunan manusia dapat diukur dengan tiga faktor yaitu faktor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli).<sup>1</sup>

Tabel 1.1 menunjukkan provinsi-provinsi yang memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Indonesia pada tahun 2020. Capaian Indeks Pembangunan Manusia provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah. Hal itu dibuktikan dengan posisi Jawa Tengah yang tidak berada dirangking 10 besar tersebut. Provinsi Jawa Tengah berada diperingkat 13 Provinsi yang memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Indonesia. Fakta tersebut menjadi perhatian mengapa Jawa Tengah yang memiliki potensi Sumber Daya Manusia yang besar justru memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang rendah. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain disekitarnya khususnya di Pulau Jawa, Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah berada diposisi terendah setelah Jawa

---

<sup>1</sup> Novita Dewi, "Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau," *JOM Fekon* 4, no. 1 (2017): 87.

Timur (gambar 1.1). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah juga dibuktikan dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah yang masih berada di bawah Indeks Pembangunan Manusia nasional (gambar 1.2). Maka sudah seharusnya sektor pembangunan manusia mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi dari Pemerintah.<sup>2</sup>

**Tabel 1. 1 10 Provinsi di Indonesia dengan Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi Tahun 2020**

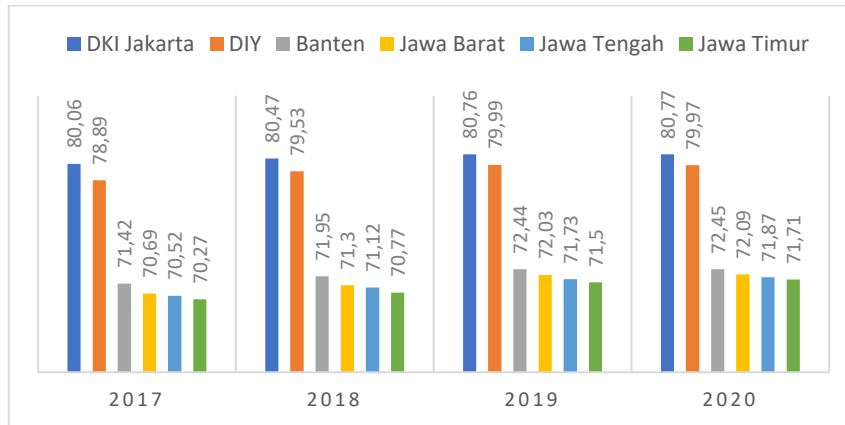
<b>Ranking</b>	<b>Provinsi</b>	<b>IPM</b>
1	DKI Jakarta	80,77
2	DIY	79,97
3	Kalimantan Timur	76,24
4	Kep. Riau	75,59
5	Bali	75,50
6	Sulawesi Utara	72,93
7	Riau	72,71
8	Banten	72,45
9	Sumatra Barat	72,38
10	Jawa Barat	72,09

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017-2020,diolah.

---

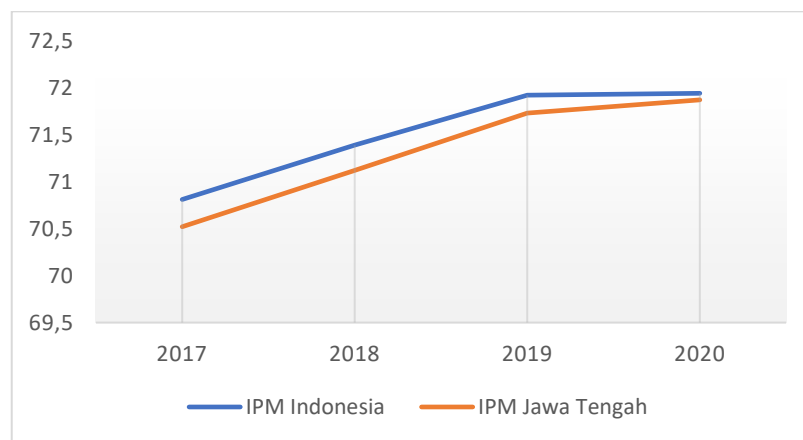
<sup>2</sup> Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html> pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 20.30 WIB.

**Gambar 1. 1 Capaian Indeks Pembangunan Manusia**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017-2020, diolah

**Gambar 1. 2 Perbandingan IPM Nasional dan IPM Jawa Tengah**



Sumber: Badan Pusat Statistik 2017-2020, diolah.

Pemerintah Pusat memberikan hak otonomi ditingkat daerah atau disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah ditingkat bawah untuk mengelola wilayahnya sendiri berdasarkan asas otonomi.<sup>3</sup> Desentralisasi diharapkan dapat mendorong kemandirian Pemerintah Daerah. Desentralisasi tingkat daerah juga mencakup

<sup>3</sup> Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 1.

desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang dibidang keuangan dari Pemerintahan yang lebih tinggi ke Pemerintahan yang lebih rendah guna membantu tugas dan fungsi Pemerintahan dan pelayanan publik.<sup>4</sup> Desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Desentralisasi fiskal menganut pada prinsip dasar yaitu “*Money Follows Functions*”, artinya fungsi pokok atas pelayanan umum diserahkan dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada Pemerintah Daerah.<sup>5</sup>

Pemerintah daerah berhak mengelola pendapatan dan kebutuhan belanjanya sendiri yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing daerah tersebut. Semakin banyak pendapatan yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar pula kewenangannya untuk membelanjakannya. Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuannya mengelola aset dan sumber daya yang dimilikinya. Tiap daerah Kabupaten/Kota mempunyai beberapa sumber pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung keberhasilan ekonomi daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2017-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2019.<sup>6</sup>

---

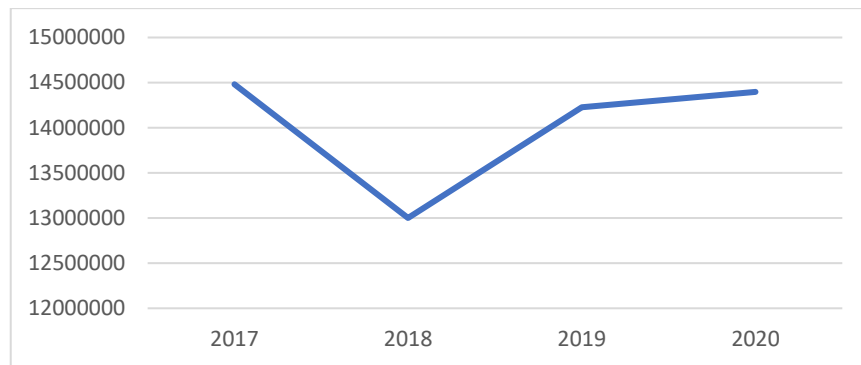
<sup>4</sup> Hadi Sasana, “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah,” *Dinamika pembangunan* 3, no. 2 (2006): 147.

<sup>5</sup> Altito R. Siagan, “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Propinsi Jawa Barat)” (Universitas Diponegoro, 2010), 3.

<sup>6</sup> Rico Putra and Surya Hidayat, “Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi,” *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 3, no. 4 (2016): 245.

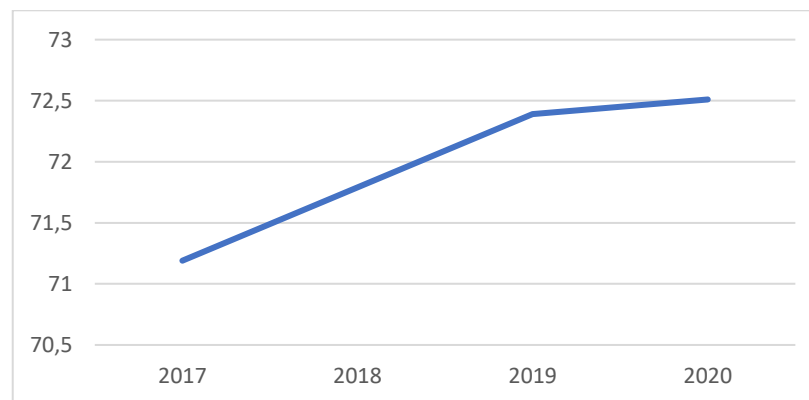
**Gambar 1. 3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah**

(dalam rupiah)



Sumber: Statistik Keuangan BPS 2017-2020, diolah.

**Gambar 1. 4 Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Jawa Tengah**



Sumber : Badan Pusat Statistik 2017-2020, diolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu dan Ni luh Supadmi (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya, jika Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan, maka Indeks Pembangunan Manusia yang dicapai juga akan

terjadi kenaikan pula.<sup>7</sup> Namun dari beberapa data Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia, menunjukkan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia. Begitu pula sebaliknya, penurunan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu terjadi penurunan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Fenomena tersebut juga terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2020. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 14.481.605.303.000,00.- menjadi Rp. 13.000.699.554.000,00.-. Penurunan pendapatan tersebut tidak diikuti dengan penurunan Indeks Pembangunan Manusia, pada tahun 2018 rata-rata capaian Indeks Pembangunan Manusia masih mengalami kenaikan dari 71,19 menjadi 71,79. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan peneliti untuk memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai obyek penelitian.

Hak otonomi juga dimiliki oleh Pemerintah Desa. Pemberian hak otonomi desa dimaksudkan agar desa melalui Pemerintah Desa mampu mengatur sendiri kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul, hak istiadat, dan nilai sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat desa. Hak otonomi desa juga berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Desa untuk mengatur keuangan dan kelembagaan desa. Sebuah desa dalam pelaksanaan otonomi tentu membutuhkan dukungan dana baik yang berasal dari Pendapatan Asli Desa maupun dukungan dana dari Pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah mengucurkan sebuah dana yang diperuntukkan untuk desa untuk dikelola demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah membelanjakan APBN untuk membangun desa melalui Dana Desa (DD). Dana Desa dianggarkan dari APBN yang ditujukan untuk desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana Desa diprioritaskan untuk upaya dalam pembangunan dan pemberdayaan manusia. Dana Desa didistribusikan kepada masing-masing Pemerintah Desa dengan besaran nominal yang berbeda-beda tiap wilayahnya. Semakin besar Dana Desa yang diterima, maka semakin besar pula tingkat pembangunan desa. Hal tersebut

---

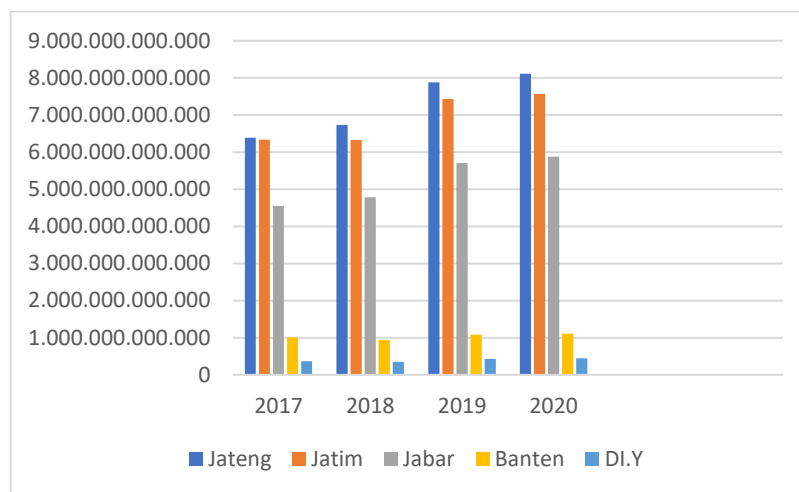
<sup>7</sup> Ida Ayu Canda and Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia," *E-Jurnal Akuntansi* 15, no. 3 (2016): 5.



juga akan berdampak baik terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Dana Desa diharapkan juga mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemandirian ekonomi tingkat desa.<sup>8</sup>

**Gambar 1. 5 Dana Desa**

(dalam rupiah)



Sumber: LKPP, 2017-2020, diolah.

Berdasarkan gambar 1.5 dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Tengah mendapatkan dana desa dengan jumlah yang besar yaitu sebesar Rp. 6.384.182.479.061,00.- pada tahun 2017, Rp. 6.732.319.742.397,00.- pada tahun 2018, tahun 2019 mendapatkan dana sebesar Rp. 7.882.401.592.997,00.- dan Rp. 8.116.084.493.083,00.- pada tahun 2020. Jumlah Dana Desa yang diperoleh Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dan lebih besar dari pada dana desa di Provinsi lainnya seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan DI Yogyakarta. Perolehan dana desa yang tinggi ini sudah seharusnya diimbangi dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Larasati Prima Oktara, *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 10.

<sup>9</sup> Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017-2020 diakses dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 13.30 WIB.

Namun penerimaan Dana Desa yang besar tersebut justru tidak sejalan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang dicapai. Berdasarkan tabel 1.1 dan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah masih tergolong rendah. Jika dibandingkan dengan provinsi disekitarnya, capaian Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah diposisi lebih rendah dibanding dengan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi lain yang mendapatkan anggaran Dana Desa lebih kecil seperti DI Yogyakarta, Banten, dan Jawa Barat (Gambar 1.5).<sup>10</sup>

Peneliti-peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa, dan Indeks Pembangunan Manusia. Otong Suhyanto, et.all (2020) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Dana Transfer, Dana Desa dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Transfer (DAU, DBH, DAK dan pendapatan lain yang sah), Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.<sup>11</sup> Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hastu Sarkoro dan Zulfikar (2016) tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam penelitian lain justru menampilkan hasil yang kontradiktif, seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Adel, et.all (2019) tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli

---

<sup>10</sup> Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html> pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 13.20 WIB.

<sup>11</sup> Otong Suhyanto et al., "Pengaruh Dana Transfer Dana Desa Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 4, no. 3 (2020): 285.

<sup>12</sup> Hastu Sarkoro and Zulfikar, "Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Propinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014)," *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1, no. 1 (2016): 57.

Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian juga menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak terbukti berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal.<sup>13</sup> Hasil yang sama juga didapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2016) dengan judul pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jeneponto (Perspektif Ekonomi Islam) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.<sup>14</sup> Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2019) mengenai pengaruh Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan hasil yang kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan oleh Otong Suhyanto. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf menyatakan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.<sup>15</sup>

Perbedaan pendapat antara penelitian terdahulu menyebabkan penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa, dan Indeks Pembangunan Manusia semakin menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Desa (DD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020”**.

---

<sup>13</sup> Adel Rivianto, Henri Agustin, and Halmawati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017,” *Jurnal Eksplorasi akuntansi* 1, no. 1 (2010): 1.

<sup>14</sup> Rahman, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Jeneponto (Perspektif Ekonomi Islam)” (UIN Makassar, 2016), 100.

<sup>15</sup> M. Afrizal Yusuf, “Pengaruh Dana Transfer Daerah Dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018” (UIN Walisongo, 2019), 88.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2020 ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2020 ?
3. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2020 ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2020.
2. Untuk menguji pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2020 .
3. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2020.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam tujuan penelitian di atas, maka mafaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Instansi
  - 1) Bagi instansi UIN Walisongo, tulisan ini diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran serta menjadi data dasar dan data pendukung bagi penelitian selanjutnya.

- 2) Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan kebijakan dan operasional Pemerintahannya.
- b. Bagi Peneliti
- 1) Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar dibangku kuliah
  - 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar arjana Ekonomi (SE)
- c. Bagi Pembaca
- 1) Sebagai referensi sumber data untuk melakukan penelitian sejenis
  - 2) Sebagai tambahan wawasan bagi para pembaca.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi penjelasan tentang pentingnya masalah yang dihadapi untuk dipecahkan. Pada Bab I berisi latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini berisi kerangka teori berupa penjabaran dari teori tentang desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam perspektif Islam. Selain itu juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka berpikir, serta hipotesis dari penelitian.

##### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini berisi penjabaran tentang metode penelitian yang digunakan. Bab ini memuat beberapa sub bab diantaranya jenis data, sumber data, populasi, sampel,

metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data.

#### BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang penyajian data, analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

#### BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini memuat kesimpulan penelitian dan saran kepada pihak-pihak terkait yang mendapat manfaat dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Desentralisasi fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menunjang perekonomian nasional diantaranya produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga.<sup>16</sup> Kebijakan fiskal menjadi sarana menuju tercapainya sasaran pembangunan, antara lain : pertumbuhan ekonomi, kestabilan, dan pemerataan pendapatan.<sup>17</sup> Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan negara diantaranya yaitu : pajak, bea cukai, devisa negara, pariwisata, dll. Sedangkan pengeluaran negara diantaranya belanja persenjataan, proyek pembangunan, belanja pegawai, pembangunan sarana dan prasarana, dll.

Terdapat tiga fungsi pokok kebijakan fiskal kaitannya dengan fungsi pengawasan keuangan, diantaranya :

- Fungsi alokasi ialah mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dimasyarakat agar kebutuhan masyarakat akan barang terpenuhi.
- Fungsi distribusi bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendapatan nasional yang adil.
- Fungsi stabilisasi yaitu untuk kestabilan perekonomian negara.<sup>18</sup>

Desentralisasi fiskal adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak dan sumber lain yang diatur dalam undang-undang.<sup>19</sup> Prinsip

---

<sup>16</sup> Ayie Fathurrahman, “Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan,” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2020): 73.

<sup>17</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 148.

<sup>18</sup> Fathurrahman, “Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan,” 73–74.

<sup>19</sup> Galih Pamulu, “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melek Huruf Perempuan Dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” (Universitas Diponegoro, 2012), 45.

dari desentralisasi fiskal yaitu “*Money Follows Functions*”, yang berarti penyerahan fungsi pokok atas pelayanan publik melalui dukungan pembiayaan dari Pemerintah pusat dengan cara penyerahan sumber-sumber pendapatan kepada Pemerintah daerah.<sup>20</sup>

Adapun sumber-sumber Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima Pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang.

b) Transfer pusat ke daerah

Transfer pusat ke daerah yaitu sejumlah dana atau anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada Pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan jenis ini diberikan dalam bentuk Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Alokasi Khusus dan Penyesuaian.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan jenis ini mencakup seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan, diantaranya hibah, dana darurat, dll.<sup>21</sup>

Sedangkan dari sisi pengeluaran, pengeluaran daerah dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- a. Pengeluaran Rutin, diantaranya pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, membayar bunga cicilan hutang, dll.

---

<sup>20</sup> Siagan, “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Propinsi Jawa Barat),” 3.

<sup>21</sup> Erny Murniasih and M. Syarif Mulyadi, “Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 12, no. 1 (2011): 57.



- b. Pengeluaran Pembangunan, diantaranya pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga, anggaran pembangunan daerah, dll.<sup>22</sup>

Desentralisasi fiskal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah sub nasional/daerah akan lebih efisien dalam memproduksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan pada level Pemerintah lokal akan lebih didengarkan guna menganeekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Desentralisasi juga dapat menciptakan efisiensi ekonomi dalam dinamika pertumbuhan ekonomi.<sup>23</sup> Salah satu wujud desentralisasi fiskal ialah dalam bentuk kewenangan daerah guna mengatur pendapatan dan belanjanya sendiri yang dilaksanakan dalam bentuk APBD. Pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kepentingan rakyatnya dan harus disesuaikan dengan kebutuhan rakyatnya guna mewujudkan kesejahteraan.

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari dalam daerahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan ekonomi daerah dapat diukur oleh besar kecilnya kontribusi yang dapat diberikan Pendapatan Asli Daerah kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Semakin besar perolehan Pendapatan Asli Daerah yang dapat dihasilkan oleh daerah akan memperkecil tingkat

---

<sup>22</sup>Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/955/8/BAB%252011.pdf> pada tanggal 3 April 2020 pukul 01.19 WIB

<sup>23</sup> Hadi Sasana, "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, no. 1 (2009): 116.

ketergantungan daerah atas bantuan dari pusat.<sup>24</sup> Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain.<sup>25</sup>

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak baik individu maupun badan kepada daerah dimana wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Pelaksanaan pajak daerah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 terkait perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak-pajak yang pengelolaannya diatur oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama atas kepemilikan kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah retribusi/pungutan yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Pemerintah daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu. Retribusi diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kelompok, diantaranya:

- 1) Retribusi jasa umum, ialah pungutan yang dikenakan atas pelayanan/jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik untuk perseorangan maupun badan untuk kepentingan umum. Retribusi umum terdiri dari retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran, retribusi atas pelayanan kesehatan, retribusi atas pelayanan kebersihan, retribusi atas pelayanan pasar, dan lain-lain.
- 2) Retribusi jasa khusus/retribusi jasa usaha, yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik

---

<sup>24</sup> Sarkoro and Zulfikar, "Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Propinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014)," 57.

<sup>25</sup> Phaurela Artha Wulandari and Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 24–32.

untuk perseorangan maupun badan guna kepentingan komersial. Retribusi jasa khusus/usaha diantaranya retribusi terminal, tempat parkir khusus, tempat rekreasi dan olahraga, villa, dan lain sebagainya.

- 3) Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa/pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada perseorangan atau badan terkait pemberian izin. Pelaksanaan retribusi perizinan tertentu bertujuan untuk pengaturan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan tata ruang, sumber daya alam, dan lain-lain guna memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan. Retribusi jenis ini meliputi retribusi izin trayek, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Sumber Pendapatan Asli Daerah jenis ini bersumber dari kekayaan milik daerah dimana kekayaan tersebut telah dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan dalam APBD. Selain itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membantu dalam pelayanan masyarakat.<sup>26</sup>

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang termasuk kedalam lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu: a) bagian atas keuntungan perusahaan milik daerah, b) bagian yang berasal dari bank lembaga keuangan bank, c) bagian yang berasal dari keuntungan Lembaga keuangan non bank, d) bagian atas penyertaan modal/investasi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Muhmmad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah," *Jurnal Dinamika Ekoomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 34.

<sup>27</sup> Ibid., 35.

### 2.3 Dana Desa (DD)

Dana Desa yaitu sejumlah dana yang berasal atau dianggarkan dari APBN setiap tahunnya yang diperuntukkan untuk desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa.<sup>28</sup> Besaran anggaran dana desa tiap desa berbeda-beda nominalnya disesuaikan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa tersebut.

Dalam penggunaan dana desa terdapat prinsip-prinsip prioritas, seperti halnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. Prioritas penggunaan dana desa diantaranya bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan lain-lain. Prioritas penggunaan dana desa dibidang pembangunan desa yang dimaksud diantaranya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan, sosial, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, kesiapsiagaan terhadap bencana, serta sarana prasarana lainnya yang diputuskan melalui musyawarah desa. Selain itu, dana desa juga diprioritaskan untuk pelayanan publik untuk upaya peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan anak kerdil (*stunting*).<sup>29</sup> Sedangkan prioritas penggunaan dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat adalah program/rancangan pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan kualitas serta kapabilitas masyarakat desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa diantaranya pengembangan kapasitas masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan ketahanan keluarga dan masyarakat desa, pengelolaan sistem informasi desa, dukungan permodalan usaha ekonomi BUMDes, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dibidang pendidikan dan pemberdayaan, dukungan pengelolaan usaha ekonomi kelompok masyarakat dan koperasi desa, dan lain-lain.<sup>30</sup>

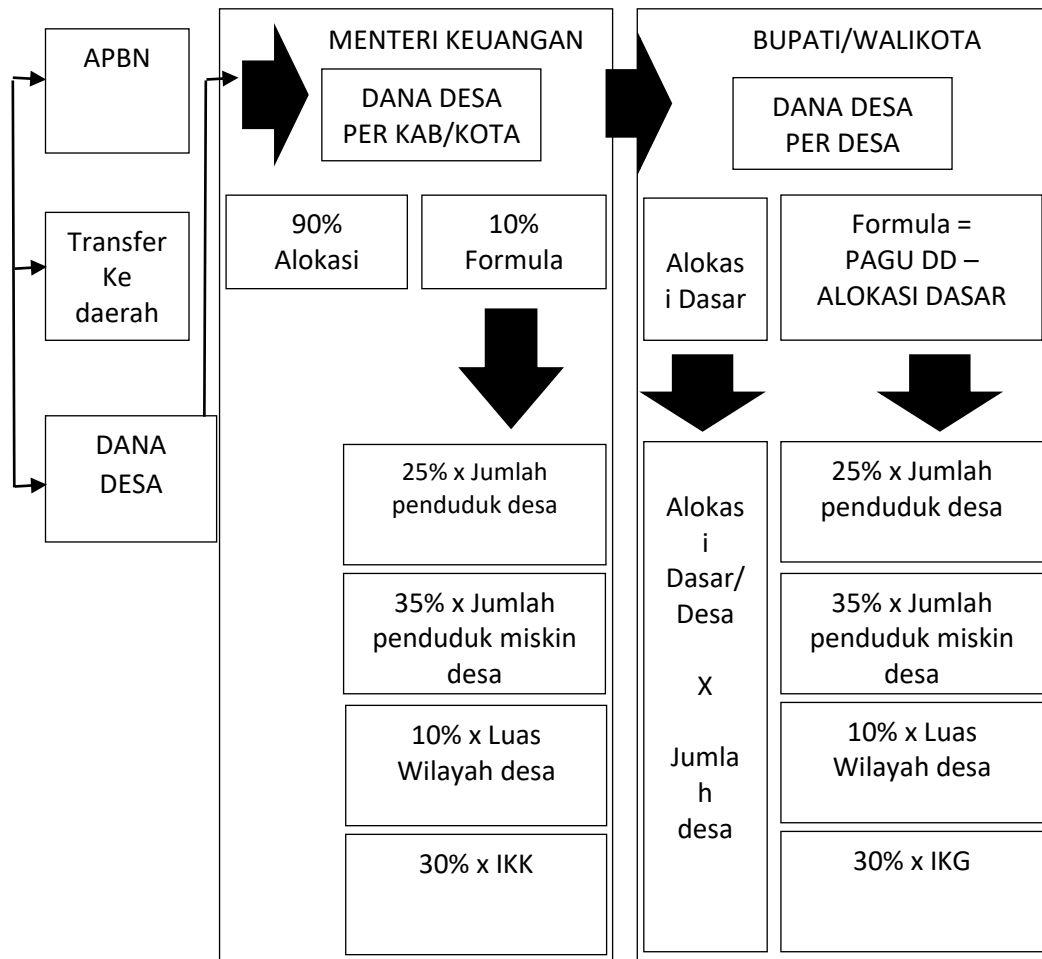
---

<sup>28</sup> Oktara, *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa*, 10.

<sup>29</sup> Dwi Novianto, *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa* (Kalimantan Barat: Dermawati Press, 2019), 16–19.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 24–27.

**Gambar 2. 1 Skema Pengelolaan Dana Desa<sup>31</sup>**



#### 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kesuksesan tujuan pembangunan, khususnya pembangunan manusia bisa diamati dan diukur dari fenomena-fenomena yang sering dihadapi masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain, kemiskinan, kesehatan, kesejahteraan, pengangguran dan buta huruf. Namun penilaian secara parsial tingkat capaian keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah sangat bervariasi. Hal tersebut dikarenakan pada beberapa wilayah berbeda dalam hal aspek pembangunan, dimana beberapa indikator pembangunan dapat tercapai namun gagal dalam indikator pembangunan lainnya. Pembangunan manusia menjadi topik bahasan

<sup>31</sup> Oktara, *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa*, 15.

yang menarik diseluruh dunia. Sampai pada akhirnya UNDP (*United Nations Development Programme*) mengenalkan suatu konsep yang menggabungkan antara indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks ekonomi.<sup>32</sup>

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) ialah suatu indeks untuk menghitung perbandingan angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup. Indeks Indeks ini dapat dijadikan parameter dalam mengidentifikasi suatu negara dapat dikatakan sebuah negara terbelakang, berkembang, atau maju, serta berguna dalam menganalisis pengaruh kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi terhadap kualitas hidup penduduknya. Apabila sarana dan prasarana publik tersedia dengan baik maka masyarakat akan merasakan kenyamanan sehingga dapat menjalankan kehidupan dengan efektif dan efisien.<sup>33</sup> Bukan hanya ditingkat nasional, Angka Indeks Pembangunan Manusia juga dapat dijadikan parameter perbandingan kemajuan antara suatu daerah dengan daerah lainnya.

Indeks ini dicetuskan oleh Amartya Sen dari India dan Mahbub ul Haq dari Pakistan, mereka mulai mengembangkan teori indeks ini pada tahun 1990 dan didukung oleh seorang ekonom bernama Gustav Ranis dan Lord Meghnad Desai. Amartya Sen lebih memilih memfokuskan pengukuran indeks ini kepada hal-hal yang lebih “vulgar” atau “sensitif” daripada menggunakan indikator pendapatan nasional yang selama ini sering digunakan. Selanjutnya, indeks ini digunakan dalam program pembangunan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia tahunannya.<sup>34</sup>

UNDP mengenalkan sebuah metode baru untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2010. Formula tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan pada tahun 2011 dan 2014. Perubahan ini dilakukan didasari atas beberapa alasan diantaranya, sudah tidak relevannya penggunaan indikator lama

---

<sup>32</sup> Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 147.

<sup>33</sup> Sarkoro and Zulfikar, “Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Propinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014,” 56.

<sup>34</sup> Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia* (Jakarta: Indocamp, 2018), 8.

dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia. Indikator Produk Domestik Bruto sudah tidak dapat lagi mencerminkan pendapatan penduduk, dan rumus aritmatik yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia metode lama mencerminkan bahwa rendahnya capaian disatu indikator mampu ditutup dengan indikator lain yang bernilai tinggi.<sup>35</sup> Adapun perubahan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia antara lain :

- a. Indikator Angka Melek Huruf berubah menjadi Angka Harapan Lama Sekolah.
- b. Indikator Produk Domestik Bruto berubah menjadi Produk Nasional Bruto per kapita.<sup>36</sup>

Indeks Pembangunan Manusia dapat dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}}$$

Adapun batasan skor Indeks Pembangunan Manusia yaitu antara 0 sampai 100. Semakin besar skor IPM atau mendekati angka 100 (seratus), maka semakin besar pula tingkat pembangunan manusianya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa negara atau daerah tersebut mempunyai kualitas SDM yang baik. Sebaliknya, jika skor IPM semakin kecil atau mendekati 0 (nol) maka semakin kecil tingkat pembangunan manusianya, atau dengan kata lain negara atau daerah tersebut mempunyai kualitas SDM yang buruk.<sup>37</sup> UNDP menggolongkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- *Very high HDI* :  $IPM \geq 80$
- *High HDI* :  $70 \leq IPM < 80$
- *Medium HDI* :  $60 \leq IPM < 70$
- *Low HDI* :  $IPM < 60$

<sup>35</sup> Paramitha Hanifa, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak 2018* (Demak: BPS Kabupaten Demak, 2018), 3–5.

<sup>36</sup> Ibid., 4.

<sup>37</sup> Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 147–148.

Dari tahun ke tahun, capaian Indeks Pembangunan Manusia suatu wilayah dapat berubah-ubah baik mengalami peningkatan, penurunan, maupun tetap. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia bertujuan untuk menggambarkan tingkat perbandingan antara capaian IPM periode t dengan capaian IPM periode sebelumnya (t -1).<sup>38</sup>

Rumus pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia :

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Beberapa indikator Indeks Pembangunan Manusia, antara lain :

a) Indeks Harapan Hidup (*Longevity*)

Indeks ini merupakan rata-rata jumlah tahun yang diperkirakan mampu dijalani seseorang selama hidupnya. Indeks tersebut menggambarkan kondisi kesehatan penduduk.<sup>39</sup>

b) Indeks Pendidikan (*Knowledge*)

Dalam pengukuran tingkat pendidikan masyarakat memakai indikator rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.

c) Indeks Standar Hidup Layak (*standard of living*)

Indeks ini mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Dalam pengukuran indeks harapan hidup UNDP berpedoman kepada tingkat Produk Nasional Bruto per kapita.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Hanifa, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak 2018*, 7.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 9.



Adapun setiap indeks indikator dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X_{ij} = \frac{(X_{ij} - X_{i \text{ min}})}{(X_{i \text{ maks}} - X_{i \text{ min}})}$$

Keterangan :

$X_{ij}$  = Komponen IPM ke-I dari daerah ke-j

$X_{i \text{ min}}$  = Nilai minimal dari komponen IPM ke-i

$X_{i \text{ maks}}$  = Nilai maksimal dari komponen IPM ke-i

Tidak dapat dipungkiri bahwa iklim politik disuatu negara akan berpengaruh terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia negara tersebut. Kondisi politik negara yang bergejolak menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia condong menurun. Hal tersebut dapat dilihat di beberapa negara seperti Thailand, Afrika Selatan, termasuk juga di Negara Indonesia. Kondisi iklim politik Indonesia yang belum matang menyebabkan tidak jelasnya atau belum terbentuknya arah pembangunan manusia yang ingin dicapai. Upaya untuk mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, tentunya perlu adanya peranan Pemerintah didalamnya. Demi terciptanya dinamika politik yang stabil harus ada sinergi antara Pemerintah dan rakyatnya. Pemerintah dan rakyat yang bekerjasama demi mewujudkan kesejahteraan bagi negaranya untuk terciptanya negara yang *Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofur*. Negara yang *Baldatun Thoyyibatun warobbun Ghofur* adalah suatu negara yang baik dengan penduduknya yang senantiasa memperoleh ampunan dari Allah SWT (Q.S. As-Saba' ayat 15).<sup>41</sup>

## 2.5 Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam

Agama Islam memberikan perhatian besar pada sektor pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia dengan ketiga instrumennya yaitu

---

<sup>41</sup> Sabdo, "Konsep "Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur" Sebagai Tujuan Akhir Proses Transformasi Sosial Islam," *At-Thariq* 1, no. 2 (2018): 3.

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga diberikan perhatian yang besar dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda :

*“ Barang siapa diantara kamu yang bangun di pagi hari dengan perasaan aman, sehat tubuhnya dan cukup persediaan makanan pokoknya untuk hari itu, seakan-akan ia telah diberi semua kenikmatan dunia ” (H.R. Tirmidzi)*

Dalam islam, aspek yang paling berpengaruh untuk menentukan kesuksesan pembangunan manusia ialah faktor manusia itu sendiri.<sup>42</sup> Faktor manusia yang dimaksud disini tentunya adalah manusia yang ber *akhlak karimah* dan merdeka. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al Hud ayat 61 bahwa manusia diciptakan dengan tugas memakmurkan bumi.

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya : *“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”(Q.S. Al Hud 11:61)*

Islam telah mengajarkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam instrumen Indeks Pembangunan Manusia. Instrumen pertama yaitu Pendidikan. Pembangunan manusia dapat dicapai dengan meningkatkan mutu pendidikan. Islam sangat menaruh perhatian terhadap pendidikan. Menuntut ilmu wajib

---

<sup>42</sup> Irmayanti, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Polewari Mandar” (UIN Alauddin Makassar, 2017), 26.

hukumnya untuk semua umat islam.<sup>43</sup> Manusia yang berilmu akan mampu memilah bab yang benar dan salah, hal baik dan buruk, bijaksana, serta menjadikan umat islam sebagai manusia yang bermartabat dan mulia. Orang-orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-Mujadilah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis, “Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S. Al- Mujadilah : 11)

Instrumen yang kedua yaitu angka harapan hidup. Instrumen ini identik dengan tingkat kesehatan.<sup>44</sup> Islam memberikan perhatian yang besar dalam semua aspek kehidupan termasuk aspek kesehatan seperti halnya larangan mengkonsumsi hal-hal yang berbahaya (Al-Maidah:3). Kesehatan jasmani dan rohani sangat dibutuhkan oleh seorang manusia . Kesehatan merupakan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya dan perlu disyukuri dan dirawat. Agama Islam juga menanamkan nilai-nilai pentingnya menjaga kesehatan Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

<sup>43</sup> Tofan Wahyu Dwi Prasetyo, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (UIN Raden Intan Lampung, 2018), 37.

<sup>44</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak 2017* (Demak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2017), 8.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a dia berkata; Nabi SAW: “Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang.”* (HR. Al-Bukhori)

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa manusia kerap kali lalai terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT kepada manusia berupa nikmat sehat dan waktu yang luang. Terkadang manusia yang memiliki nikmat sehat namun tidak memiliki waktu yang luang untuk menikmatinya, sehingga ia terlalu sibuk dengan urusannya. Pada sisi lain terkadang manusia mempunyai waktu yang luang namun tidak dalam kondisi yang sehat sehingga tidak dapat menikmati waktu luangnya. Manusia yang memiliki nikmat sehat dan waktu yang luang haruslah bersyukur dan senantiasa memelihara nikmat tersebut.<sup>45</sup>

Komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia yang terakhir yaitu ekonomi atau instrumen standar hidup layak. Rasulullah SAW senantiasa meminta perlindungan kepada Allah SWT dari kefakiran.<sup>46</sup> Rasulullah bersabda : *“Wahai Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran:”* (HR. Abu Dawud).

Pengukuran HDI dalam persepektif islam dapat dinyatakan dalam I-HDI (*Islamic Human Development Indeks*). Instrumen dalam I-HDI tidak hanya mencakup pencapaian dan pembangunan manusia dalam hal kesejahteraan duniawia namun mencakup kesejahteraan di dunia maupun akhirat (*falah*). Upaya pembangunan manusia yang berorientasi pada tujuan *falah* sehingga tercapai kemaslahatan (*maqasid syariah*). Hal tersebut dikarenakan *maqashid syariah* itu sendiri merupakan hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh umat manusia untuk mencapai tujuan *falah*. Jika hal-hal pokok tersebut tidak dapat terpenuhi maka manusia tidak akan merasakan kebahagiaan yang sempurna (*al-*

---

<sup>45</sup> Ayu Laila Fitri, “Kesadaran Terhadap Nikmat Waktu Luang (Studi Ma’anil Hadith Riwayat Imam Al-Nasai Nomor Indeks 11800 Perspektif Psikologi Kepribadian)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 105.

<sup>46</sup> Salahuddin El Ayyubi, *Islam dan Indeks Pembangunan Manusia*, Dosen IE FEM IPB dan Peneliti Pusat Studi Bisnis dan ekonomi Syariah (CIBEST) IPB, diakses pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 12.50 WIB.

*Syatibi*).<sup>47</sup> Komponen pengukuran I-HDI dapat menggunakan konsep *Maqasid syariah*. Menurut Al-Syatibi, masalah dasar dalam kehidupan manusia terdiri atas lima hal, meliputi agama (*ad-dien*), akal (*al-'aql*), jiwa (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan keturunan (*an-nasl*). Kelima hal itu menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Apabila salah satunya tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat dicapai dengan seimbang maka kebahagiaan hidup tidak akan tercapai secara sempurna.<sup>48</sup>

1. Memelihara agama (*Hifdzu ad-Dien*)

Agama bukan hanya membahas mengenai akidah saja namun juga aturan kehidupan serta moralitas umat.

2. Memelihara jiwa (*Hifdzu an-Nafs*)

Islam juga memberikan perhatian besar terkait kehidupan. Kehidupan ialah anugerah-Nya yang harus dipelihara serta digunakan sebaik-baiknya oleh manusia. Hal-hal yang menyebabkan atau berpotensi menimbulkan kesakitan dan kematian harus dihindari.

3. Memelihara akal (*Hifdzu al-'Aql*)

Ilmu pengetahuan sangat penting peranannya untuk umat manusia. Manusia membutuhkan ilmu untuk dapat memahami kebesaran Allah SWT baik ayat *kauniyyah* maupun ayat-ayat *qauliyah*.

4. Memelihara keturunan (*Hifdzu an-Nasl*)

Indikator *An-Nasl* berkaitan dengan keluarga dan keturunan. Manusia harus memelihara keluarga dan keturunan untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan kehidupan manusia.

5. Memelihara harta (*Hifdzu al-Maal*)

Indikator *al-Maal* berkaitan dengan harta material. *Hifdzu al-Maal* mencerminkan indeks kehidupan layak. Harta merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kebutuhan duniawi dan ibadah. Harta dibutuhkan untuk keperluan duniawi guna mencukupi kebutuhan sandang,

---

<sup>47</sup> Maya Masita Septiarini and Sri Herianingrum, "Analisis I-HDI (Islamic-Human Development Index) Di Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 5 (2017): 384.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 285.

pangan, dan papan. Harta juga dibutuhkan manusia untuk keperluan ibadah seperti halnya zakat, infak, sedekah, wakaf, haji, dll.<sup>49</sup>

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini antara lain :

1. Hastu Sarkoro dan Zulfikar (2016) tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan, secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.<sup>50</sup>
2. Ida Ayu dan Ni Luh Supadmi (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya, semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki, maka Indeks Pembangunan Manusia yang dicapai juga meningkat. Peneliti juga membuktikan bahwa Belanja Modal juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.<sup>51</sup>
3. Rimawan & Fenny (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. Penelitian menunjukkan

---

<sup>49</sup> Rizky Ramatullah, "Islamic Human Development Index Di Kawasan Eksplorasi Tambang Batu Bara Di Batu Sopang Kalimantan Timur" (Universitas Islam Indonesia, 2018), 32.

<sup>50</sup> Sarkoro and Zulfikar, "Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Propinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014)," 54.

<sup>51</sup> Canda and Supadmi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia," 2409.

hasil bahwa Alokasi Dana Desa mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Kondisi tersebut dicerminkan oleh pembangunan infrastruktur desa, layanan kesehatan serta lembaga pendidikan yang sudah tersedia di setiap desa.<sup>52</sup>

4. Otong Suhyanto, et.all (2020) mengenai pengaruh Dana Transfer, Dana Desa dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Transfer (Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan pendapatan lain yang sah), Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.<sup>53</sup>
5. Adel, et.all (2019) tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian juga menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak terbukti menjadi mediasi hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia.<sup>54</sup>
6. Rahman (2016) dengan judul pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jeneponto (Perspektif Ekonomi Islam) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> M. Wirawan and Fenny Aryani, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaniora* 9, no. 3 (2019): 287.

<sup>53</sup> Suhyanto et al., "Pengaruh Dana Transfer Dana Desa Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat," 285.

<sup>54</sup> Rivianto, Agustin, and Halmawati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017)," 1.

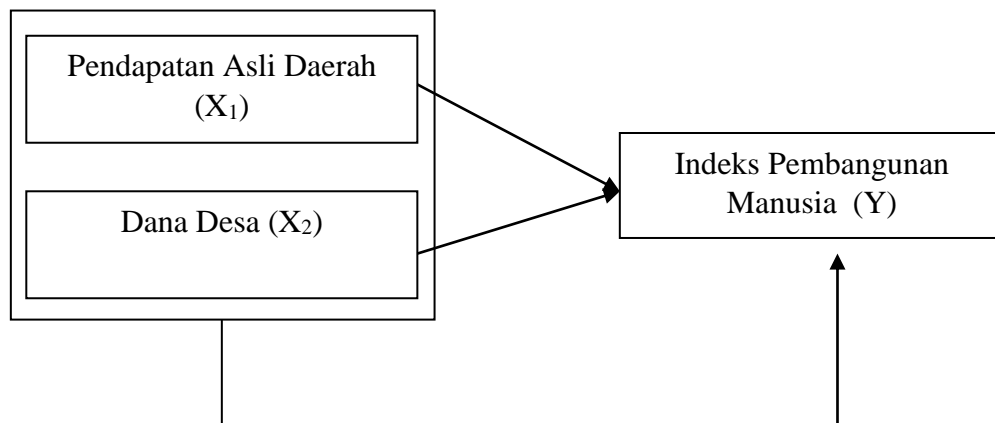
<sup>55</sup> Rahman, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Jeneponto (Perspektif Ekonomi Islam)," 97–98.

7. Yusuf (2019) mengenai pengaruh Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.<sup>56</sup>

## 2.7 Kerangka Pemikiran Teoritik

Penelitian mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>) dan Dana Desa (X<sub>2</sub>) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) Kabupaten di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2017-2020. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan dapat dibuat skema kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :

**Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Teoritik**



<sup>56</sup> Yusuf, "Pengaruh Dana Transfer Daerah Dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018," 88.



## 2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat diajukan beberapa hipotesis diantaranya :

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah akan dibelanjakan oleh Pemerintah untuk membiayai segala kebutuhan dan keperluan daerahnya. Dana tersebut juga akan digunakan untuk membiayai program-program Pemerintah dalam bidang-bidang pendukung Indeks Pembangunan Manusia seperti meningkatkan mutu pendidikan, perbaikan pelayanan kesehatan, dan perbaikan ekonomi dalam rangka meningkatkan standar hidup masyarakat. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh suatu daerah, maka semakin besar pula belanja Pemerintah dalam berbagai sektor tersebut. Maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia.<sup>57</sup> Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Hastu Sarkoro dan Zulfikar (2016) serta Ida Ayu dan Ni Luh Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

$H_1$  = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

### 2. Dana Desa

Guna meningkatkan pembangunan dan pengembangan tingkat desa, Pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah dana dari APBN kepada Pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa akan ditransfer dari Rekening Keuangan Negara (RKN) kepada Rekening Keuangan Daerah

---

<sup>57</sup> Sarkoro and Zulfikar, "Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Propinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014)," 54.

(RKD) dan selanjutnya akan didistribusikan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.<sup>58</sup> Peran Dana Desa bagi desa sangat penting karena tidak semua desa memiliki Pendapatan Asli Desa yang mencukupi untuk membiayai segala kebutuhan desa. Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa akan dibelanjakan untuk keperluan desa termasuk sektor pendukung Indeks Pembangunan Manusia meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jika Dana Desa dapat dikelola dengan benar, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut selaras dengan penelitian Melanius (2018) mengemukakan jika Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Rimawan dan Fenny (2019) juga melakukan penelitian yang mengemukakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal tersebut dibuktikan dengan Alokasi Dana Desa dapat membantu memperbaiki sarana dan prasarana serta pelayanan terhadap masyarakat seperti halnya infrastruktur desa, layanan kesehatan, dan lembaga pendidikan di setiap desa.

H<sub>2</sub> = Dana Desa berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

### 3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa

Daerah yang dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan optimal akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari Pendapatan Asli Daerah akan didistribusikan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah diberbagai sektor penunjang Indeks Pembangunan Manusia ditingkat Kabupaten/Kota. Hak otonomi yang dimiliki Pemerintah Daerah juga dimiliki oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Pusat mengalokasikan sebagian anggaran APBN untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan tujuan untuk membiayai segala urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa. TKDD terbagi kedalam beberapa bagian diantaranya Dana Transfer (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi

---

<sup>58</sup> Oktara, *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa*, 10.

Hasil, dan Pendapatan lainnya yang sah) dan Dana Desa.<sup>59</sup> Selanjutnya, Dana Desa akan didistribusikan kepada Pemerintah Desa sesuai anggaran yang ditetapkan. Dana Desa yang dikelola dengan benar akan menunjang pembiayaan desa dalam berbagai sektor penunjang Indeks Pembangunan Manusia ditingkat desa. Maka Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa akan bersama-sama meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Otong Suhyanto, et.all (2020) yang menyatakan bahwa Dana Transfer, Dana Desa dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H3 = Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

---

<sup>59</sup> Suhyanto et al., "Pengaruh Dana Transfer Dana Desa Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat," 292.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah aktivitas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data berdasar pada jumlah yang dilakukan secara objektif untuk menguji suatu hipotesis atau memecahkan suatu masalah mengembangkan prinsip-prinsip yang masih bersifat umum.<sup>60</sup>

Sumber data dapat diartikan sebagai subjek darimana data tersebut didapatkan. Sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber atau didapatkan secara tidak langsung oleh pengumpul data.<sup>61</sup> Data dalam penelitian ini didapat dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan Kanwil Jawa Tengah.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel merupakan dua hal yang tidak terpisahkan satu sama lain. Populasi yaitu keseluruhan dari objek maupun subjek penelitian dengan spesifikasi tertentu yang ditetapkan peneliti.<sup>62</sup> Populasi yang digunakan yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 35 Kabupaten/Kota.

Sampel merupakan bagian dari populasi dengan karakteristik tersebut.<sup>63</sup> Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *non probability sampling* yang selanjutnya menggunakan metode *purposive sampling*. *Non probability sampling*

---

<sup>60</sup> Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 3.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 80.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 81.

ialah suatu cara untuk mengambil sejumlah sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap item atau anggota populasi untuk dijadikan sampel kembali.<sup>64</sup> Teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan melihat beberapa pertimbangan tertentu. Peneliti melihat beberapa pertimbangan diantaranya ketersediaan data Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa, serta Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu 2017-2020.

**Tabel 3. 1 Teknik Pengambilan Sampel**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2020	35 Kabupaten/Kota
Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang tidak lengkap data Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2020	6 Kabupaten/Kota
Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang lengkap data Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2020	29 Kabupaten/Kota

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Djpb Kemenkeu, diolah.

---

<sup>64</sup> Ibid., 84.

**Tabel 3. 2 Sampel Penelitian**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/kota</b>	<b>Data 2017</b>	<b>Data 2018</b>	<b>Data 2019</b>	<b>Data 2020</b>	<b>Sampel</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kab. Cilacap	√	√	√	√	√	Digunakan
2	Kab. Banyumas	√	√	√	√	√	Digunakan
3	Kab. Purbalingga	√	√	√	√	√	Digunakan
4	Kab. Banjarnegara	√	√	√	√	√	Digunakan
5	Kab. Kebumen	√	√	√	√	√	Digunakan
6	Kab. Purworejo	√	√	√	√	√	Digunakan
7	Kab. Wonosobo	√	√	√	√	√	Digunakan
8	Kab. Magelang	√	√	√	√	√	Digunakan
9	Kab. Boyolali	√	√	√	√	√	Digunakan
10	Kab. Klaten	√	√	√	√	√	Digunakan
11	Kab. Sukoharjo	√	√	√	√	√	Digunakan
12	Kab. Wonogiri	√	√	√	√	√	Digunakan
13	Kab. Karanganyar	√	√	√	√	√	Digunakan
14	Kab. Sragen	√	√	√	√	√	Digunakan
15	Kab. Grobogan	√	√	√	√	√	Digunakan
16	Kab. Blora	√	√	√	√	√	Digunakan
17	Kab. Rembang	√	√	√	√	√	Digunakan
18	Kab. Pati	√	√	√	√	√	Digunakan
19	Kab. Kudus	√	√	√	√	√	Digunakan
20	Kab. Jepara	√	√	√	√	√	Digunakan
21	Kab. Demak	√	√	√	√	√	Digunakan
22	Kab. Semarang	√	√	√	√	√	Digunakan
23	Kab. Temanggung	√	√	√	√	√	Digunakan
24	Kab. Kendal	√	√	√	√	√	Digunakan
25	Kab. Batang	√	√	√	√	√	Digunakan
26	Kab. Pekalongan	√	√	√	√	√	Digunakan

27	Kab. Pemalang	√	√	√	√	√	Digunakan
28	Kab. Tegal	√	√	√	√	√	Digunakan
29	Kab. Brebes	√	√	√	√	√	Digunakan
30	Kota Magelang	-	-	-	-	-	Tidak digunakan
31	Kota Surakarta	-	-	-	-	-	Tidak digunakan
32	Kota Salatiga	-	-	-	-	-	Tidak digunakan
33	Kota Semarang	-	-	-	-	-	Tidak digunakan
34	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	Tidak digunakan
35	Kota Tegal	-	-	-	-	-	Tidak digunakan

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Djpb Kemenkeu, diolah.

### 3.3 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Variabel yaitu sebuah sifat, nilai, atau atribut dari seseorang, objek, ataupun aktivitas yang bermacam-macam dan ditetapkan oleh seorang peneliti guna dipelajari dan disimpulkan.<sup>65</sup> Secara umum, penentuan penelitian merupakan operasional konstrak agar dapat diukur. Operasional penelitian dan pengukuran variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3. 3 Variabel, Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan yang diterima daerah yang bersumber dari	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam	Ratio

<sup>65</sup> Ibid., 38.

	daerahnya sendiri dan dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.	tahun anggaran 2017-2020	
Dana Desa	Sejumlah dana yang berasal dari APBN dan diperuntukan untuk desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa	Realisasi Dana Desa tahun anggaran 2017-2020	Ratio
Indeks Pembangunan Manusia	Suatu indeks untuk menghitung perbandingan dari kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan dan ekonomi (standar hidup)	Capaian IPM (angka indeks) tahun 2017-2020	Ratio

### 3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang terdapat didalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengujian pengaruh yang dilakukan dengan menguji efek dari variabel independen ke variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan sebelum menguji hipotesis. Adapun tujuannya yaitu untuk menguji ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik.



Terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk memeriksa variabel pengganggu atau residual berdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan cara analisis grafik dan uji statistik.<sup>66</sup> Uji statistik normalitas dilakukan dengan uji *kolmogrov-smirnov*, apabila nilai *kolmogrov-smirnov* lebih dari  $\alpha = 0,05$  maka data yang digunakan berdistribusi secara normal.

Uji normalitas dengan analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram. Hal tersebut bermaksud untuk membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengamati *normal probability plot* untuk dibandingkan kumulatif dari distribusi normal. Jika data berdistribusi normal, maka akan terbentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis lurus diagonal. Ketika distribusi data residual normal, maka garis-garis yang menggambarkan data sesungguhnya tersebut akan mengikuti garis diagonalnya.<sup>67</sup>

2) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan guna menguji ada atau tidak korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak orthogonal. Variabel yang bersifat orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi diantara sesamanya sama dengan nol (0). Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari :

- a. Memiliki nilai tolerance di atas ( $>$ ) 0.1

---

<sup>66</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 161.

<sup>67</sup> Ibid., 161–163.

b. Mempunyai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)  $< 10$  atau nilai tolerance  $< 0.10$ .<sup>68</sup>

3) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji ketidaksamaan dalam variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji Heteroskedastisitas memiliki dua istilah yaitu homoskedastisitas dan heteroskedastisitas. Homoskedastisitas terjadi jika variasi dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya bernilai tetap. Sebaliknya, heteroskedastisitas terjadi ketika variasi dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda. Model regresi linier yang baik yaitu jika hasilnya homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.<sup>69</sup>

4) Uji Autokorelasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika tidak terdapat autokorelasi maka model regresi dikatakan baik. Metode yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi adalah dengan menggunakan Uji Durbin-Waston (DW test).

Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah :<sup>70</sup>

**Tabel 3. 4 Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi**

Jika	Hipotesis nol	Keputusan
$0 < d < dl$	Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak
$dl \leq d \leq du$	Tidak ada autokorelasi	No decision

<sup>68</sup> Ibid., 107.

<sup>69</sup> Ibid., 137.

<sup>70</sup> Ibid., 111–114.

	positif	
$4-dl < d < 4$	Tidak ada korelasi negative	Ditolak
$4-du \leq d \leq 4-dl$	Tidak ada korelasi negative	No decision
$du < d < 4-du$	Tidak ada autokorelasi (Postif atau negatif)	Tidak ditolak

## 2. Analisis Regresi Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda. Analisis regresi yaitu suatu analisis untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel terikat (*dependent*).<sup>71</sup>

Analisis regresi berganda dapat dinyatakan dalam persamaan berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_nX_n$$

Keterangan :

Y = Indeks Pembangunan Manusia

a = Konstanta

b = Koefisien variabel X

X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>2</sub> = Dana Desa

X<sub>n</sub> = Variabel bebas ke-n

## 3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara variabel dependen dan variabel independen. Pengujian terhadap hipotesis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Uji Parsial (T test)

<sup>71</sup> Shofiyon Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual&SPSS* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 301.

Uji t atau disebut juga uji parsial adalah uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Uji parsial dapat dilakukan dengan membandingkan antara  $t_{\text{hitung}}$  dengan  $t_{\text{tabel}}$ . Apabila nilai  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , atau  $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependen*). Jadi, hipotesis dapat diterima/terbukti. Sebaliknya, Jika  $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ , atau  $-t_{\text{hitung}} \geq -t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependen*). Jadi, hipotesis dapat ditolak/tidak terbukti.<sup>72</sup>

b. Uji Simultan (F test)

Uji F test atau disebut juga uji simultan adalah uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen) secara simultan (bersama-sama). Apabila nilai  $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$ , maka terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara simultan ( $H_0$  diterima). Sebaliknya, Apabila nilai  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ , maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara simultan ( $H_0$  ditolak).<sup>73</sup>

4. Analisis Koefisien Determinan ( $R^2$ ).

Koefisien determinan bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa dalam menjelaskan variasi variabel terikat Indeks Pembangunan Manusia. Nilai koefisien determinan berkisar antara 0 sampai 1. Semakin kecil nilai  $R^2$  (mendekati angka 0) maka semakin terbatas kemampuan variabel-variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variasi variabel bebas (*dependent*). Sebaliknya, semakin besar nilai  $R^2$

---

<sup>72</sup> Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, 98.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 99.

(mendekati angka 1) maka variasi variabel bebas mampu memberikan hampir semua informasi untuk memprediksi variabel terikat.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ibid., 97.

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Secara astronomis, wilayah ini berada diantara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur. Provinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah sebesar 32.800,69 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Jumlah penduduk seluruh Jawa Tengah yaitu 36.516.035 penduduk. Jawa Tengah memiliki posisi wilayah yang sangat strategis. Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat, Laut Jawa di sebelah Utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, serta berbatasan dengan Provinsi DIY dan Samudra Hindia di sebelah Selatan.<sup>75</sup>

**Tabel 4. 1 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah**

No	Kabupaten/kota	No	Kabupaten/kota
1	Kabupaten Cilacap	19	Kabupaten Kudus
2	Kabupaten Banyumas	20	Kabupaten Jepara
3	Kabupaten Purbalingga	21	Kabupaten Demak
4	Kabupaten Banjarnegara	22	Kabupaten Semarang
5	Kabupaten Kebumen	23	Kabupaten Temanggung
6	Kabupaten Purworejo	24	Kabupaten Kendal
7	Kabupaten Wonosobo	25	Kabupaten Batang
8	Kabupaten Magelang	26	Kabupaten Pekalongan
9	Kabupaten Boyolali	27	Kabupaten Pemalang
10	Kabupaten Klaten	28	Kabupaten Tegal
11	Kabupaten Sukoharjo	29	Kabupaten Brebes

---

<sup>75</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2021* (Semarang: BPS Jawa Tengah, 2021), 1–3.

12	Kabupaten Wonogiri	30	Kota Magelang
13	Kabupaten Karanganyar	31	Kota Surakarta
14	Kabupaten Sragen	32	Kota Salatiga
15	Kabupaten Grobogan	33	Kota Semarang
16	Kabupaten Blora	34	Kota Pekalongan
17	Kabupaten Rembang	35	Kota Tegal
18	Kabupaten Pati		

#### 4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berguna untuk menjelaskan deskripsi dan memberikan suatu gambaran dari suatu data. Gambaran yang diberikan diantaranya seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, range, sum, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

**Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

#### Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	116	5.27E11	2.03E11	7.30E11	3.6296E11	9.58220E10
DD	116	3.89E11	1.04E11	4.92E11	2.5099E11	8.02179E10
IPM	116	12.12	64.86	76.98	70.5026	2.88526
Valid N (listwise)	116					

Berdasarkan hasil statistik deskriptif (gambar 4.2) dapat diketahui bahwa :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan gambar di atas diketahui jika rata-rata Pendapatan Asli Daerah seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020 yaitu Rp. 362.955.080.888. Kabupaten dengan Pendapatan Daerah tertinggi yaitu Kabupaten Banyumas dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.

729.892.819.000,- dan Kabupaten dengan rata-rata Pendapatan Asli Daerah terendah yaitu Kabupaten Blora Rp. 203.166.113.000,-.

b. Dana Desa (X2)

Rata-rata Dana Desa seluruh Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2020 yaitu Rp. 250.991.278.513,- dan Kabupaten yang menerima Dana Desa paling terbesar yaitu Kabupaten Brebes dengan total Dana Desa sebesar Rp. 492.478.504.000,-. Sedangkan Kabupaten yang menerima Dana Desa terkecil yaitu Kabupaten Kudus dengan total penerimaan Dana Desa sebesar Rp. 103.687.281.000,-.

c. Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2020 yaitu 70,5026. Kabupaten dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia tertinggi yaitu Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia 76,98. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia terkecil yaitu Kabupaten Brebes dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 64,86. Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan derajat tingkat kesejahteraan masyarakat dengan beberapa indikator diantaranya pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.

### **4.3 Uji Asumsi Klasik**

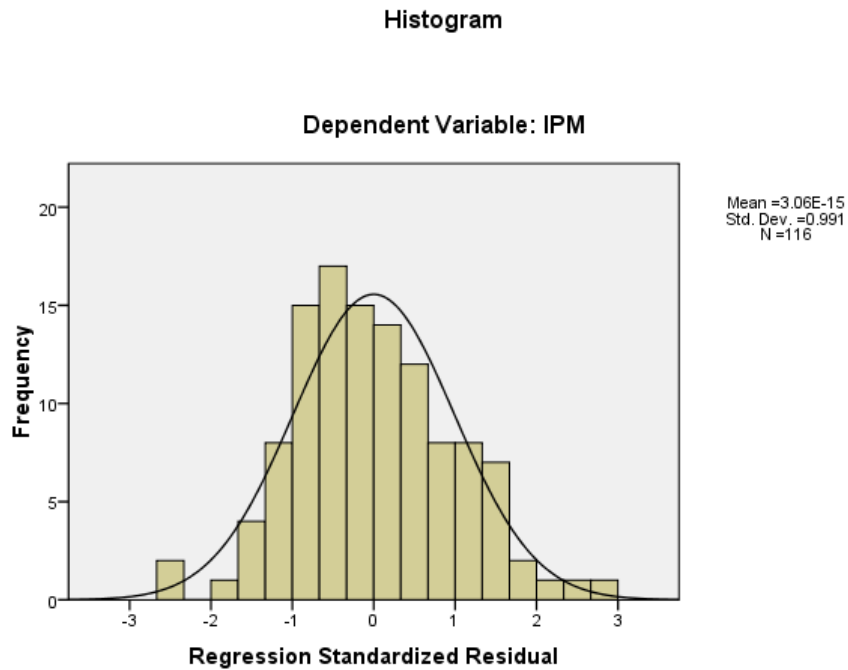
#### **4.3.1 Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik menggunakan grafik histogram dan grafik normal probability plot. Grafik histogram berfungsi untuk membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Pada grafik histogram, data yang berdistribusi normal akan memberikan pola distribusi yang tidak menceng atau sesuai dengan garis diagonalnya. Kemudian pada grafik normal probability plot, data yang berdistribusi normal akan memberikan pola yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonalnya. Selain itu, uji tersebut juga dapat menggunakan



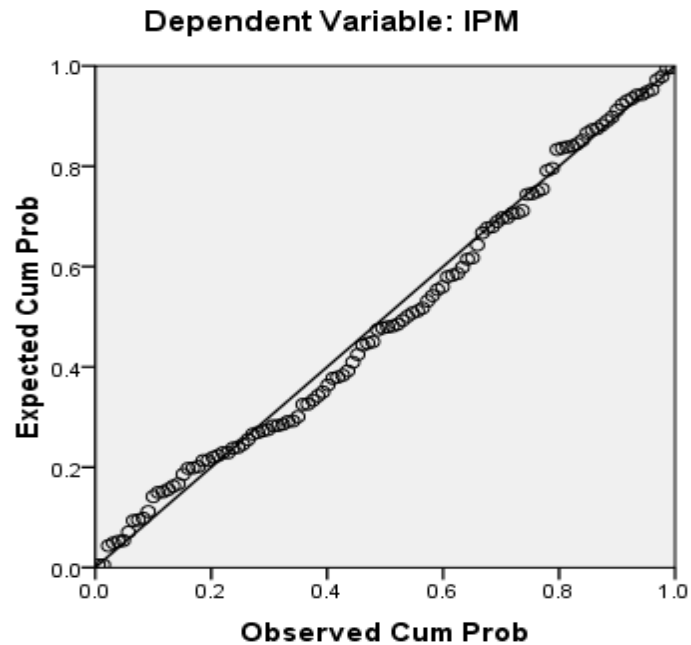
kolmogrov-smirnov, apabila nilai asmp sig lebih besar dari 0,05 artinya variabel tersebut berdistribusi normal.<sup>76</sup>

**Gambar 4. 1 Hasil Uji Grafik Histogram**



Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan menggunakan spss dalam persamaan regresi di atas dapat dilihat tampilan grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal atau data menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

<sup>76</sup> Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, 161–163.

**Gambar 4. 2 Hasil Uji Grafik P-Plot****Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Uji normalitas juga dapat dilihat dengan analisis grafik normal probability plot. Berdasarkan grafik normal probability plots of regression standardized residual di atas, terlihat titik-titik yang menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonalnya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			116
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.63268714
Most Extreme Differences	Absolute		.054
	Positive		.054
	Negative		-.045
Kolmogorov-Smirnov Z			.586
Asymp. Sig. (2-tailed)			.883
Monte Carlo Sig. (2- tailed)	Sig.		.865 <sup>c</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.857
		Upper Bound	.874
a. Test distribution is Normal.			

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Berdasarkan uji kolmogorov-smirnov dapat dilihat bahwa nilai asymp sig berada di atas 0,05 yaitu 0,883. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

#### 4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Data yang tidak mengalami gejala multikolinieritas harus memiliki besaran nilai tolerance  $> 0,1$  (10%) dan nilai VIF  $< 10$ .<sup>77</sup>

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	70.578	1.145		61.655	.000		
	PAD	8.571E-12	.000	.285	3.256	.001	.964	1.037
	DD	-1.269E-11	.000	-.353	-4.036	.000	.964	1.037

a. Dependent Variable:  
IPM

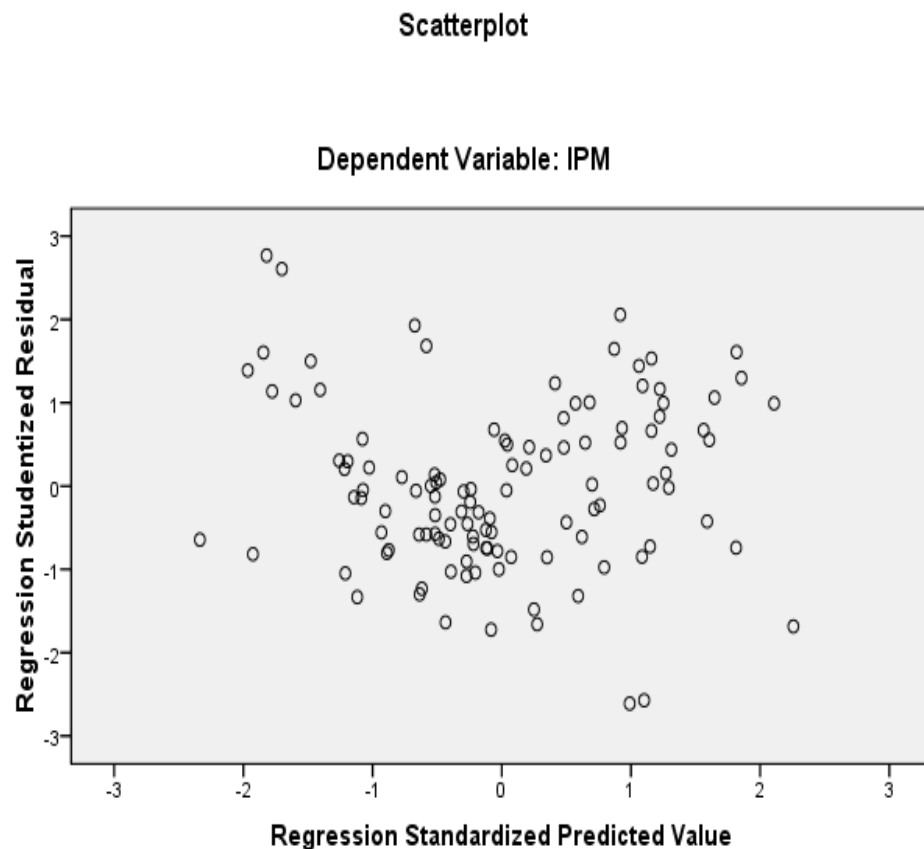
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, diketahui bahwa nilai tolerance baik Pendapatan Asli Daerah (X1) maupun Dana Desa (X2) mempunyai nilai  $0,964 > 0,10$  yang artinya tidak ada korelasi antar variabel yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) baik X1 maupun X2 mempunyai nilai yang sama yaitu  $1,037 < 10$ . Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen.

<sup>77</sup> Ibid., 107–108.

#### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut dengan homoskedastisitas. Model regresi yang tidak mengalami heteroskedastisitas adalah data yang penyebaran titik-titiknya secara acak di atas dan di bawah nol serta tidak membentuk suatu pola.<sup>78</sup>

**Gambar 4. 3 Hasil Uji Grafik Scatterplot**



Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 dan pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

<sup>78</sup> Ibid., 137–138.

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas****Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.319	.687		3.375	.001
PAD	1.310E-13	.000	.008	.083	.934
DD	-1.080E-12	.000	-.055	-.573	.568

a. Dependent Variable: AbsUt

Heteroskedastisitas juga dapat dianalisis secara statistik menggunakan Uji Glejser. Berdasarkan hasil Uji Glejser, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar  $0,934 > 0,05$ . Sedangkan nilai signifikansi variabel Dana Desa (X2) adalah  $0,568 > 0,05$ . Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi tidak ada heteroskedastisitas.

#### 4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi dapat muncul disebabkan observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut timbul disebabkan residual (kesalahan pengganggu) yang tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> Ibid., 111–112.

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi****Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.409 <sup>a</sup>	.167	.153	2.65588	.960

a. Predictors: (Constant), DD, PAD

b. Dependent Variable: IPM

Dari hasil uji autokorelasi menggunakan metode uji durbin-watson (gambar 4.6) dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 0,960. Jumlah sampel yang digunakan (n) berjumlah 116 sampel dan jumlah variabel independent 2 (k=2). Sehingga diperoleh hasil  $dl=1,6622$  dan  $du=1,7323$ . Oleh karena 0,960 (DW) lebih kecil dari 1,7323 (du) dan 0,962 (DW) kurang dari  $4 - 1,7323$  (4-du). Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terdapat gejala autokorelasi.

Jika dalam persamaan regresi terjadi autokorelasi, maka ada beberapa cara penyelesaiannya. Penyembuhan autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode cohrane-Orcutt. Berikut merupakan hasil output spss autokorelasi setelah dilakukan tahapan metode cohrane-Orcutt.

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Cohrane-Orcutt****Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.309 <sup>a</sup>	.095	.079	2.24527	1.808

a. Predictors: (Constant), Lag\_x2, Lag\_x1

b. Dependent Variable: Lag\_y

Setelah dilakukan uji Cohrane-Orcutt, nilai Durbin-Watson yaitu 1,808. Jumlah sampel akhir yang digunakan (n) berjumlah 115 sampel dan

jumlah variabel independent 2 ( $k=2$ ). Sehingga diperoleh hasil  $dl=1,6606$  dan  $du=1,7313$ . Oleh karena  $1,808$  (DW) lebih besar dari  $1,7313$  ( $du$ ) dan  $1,808$  (DW) kurang dari  $4 - 1,7313$  ( $4-du$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi.

#### **4.4 Metode Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan membaca studi literatur tentang data dan teori yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi (*Documentation*) yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan menggunakan cara mengumpulkan beberapa data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik tertulis maupun tidak tertulis seperti halnya majalah, buku-buku, jurnal, dan lainnya.<sup>80</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tertulis Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia (Periode 2017-2020) yang dibuat oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Djpb Kemenkeu) Kanwil Jawa Tengah.

#### **4.5 Uji Regresi Berganda**

Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda dilakukan guna mengetahui keterkaitan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa (sebagai variabel independent) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (sebagai variabel dependen). Hasil uji regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>80</sup> Ibid., 240.



**Tabel 4. 8 Hasil Uji Regresi Berganda****Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	70.578	1.145		61.655	.000
	PAD	8.571E-12	.000	.285	3.256	.001
	DD	-1.269E-11	.000	-.353	-4.036	.000

a. Dependent Variable: IPM

Berdasarkan hasil output spss pada tabel 4.8 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 70,578 + 8,571 X_1 - 1,269 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Indeks Pembangunan Manusia

a = Konstanta

b = Koefisien variabel X

X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>2</sub> = Dana Desa

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta yaitu nilai variabel *dependen* saat tidak ada pengaruh dari variabel variabel *independen*.<sup>81</sup> Hasil analisis menunjukkan nilai konstanta yaitu 70,578 menyatakan bahwa jika variabel Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>) dan Dana Desa (X<sub>2</sub>) dianggap konstan, maka nilai Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebesar 70,57%
- Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>) diperoleh nilai koefisien (b<sub>1</sub>) sebesar 8,571 dan menunjukkan nilai positif. Maka dapat

<sup>81</sup> Ibid., 102.

diartikan bahwa jika variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.000.000.000,00.- variabel Dana Desa (X2) diasumsikan tetap, maka dapat menyebabkan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebesar 8,571%. Nilai tersebut juga dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Dana Desa. Hal ini berarti ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga ikut mengalami kenaikan.

- c. Nilai koefisien regresi variabel Dana Desa (X2) diperoleh nilai koefisien (b2) sebesar -1,269 dan menunjukkan nilai negatif. Maka dapat diartikan jika variabel Dana Desa (X2) mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.000.000.000,00.- sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) diasumsikan tetap, maka dapat menyebabkan penurunan Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebesar 1,269%. Nilai tersebut juga dapat diartikan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti ketika Dana Desa (DD) mengalami kenaikan, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami penurunan.

## 4.6 Pengujian Hipotesis

### 4.6.1 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk menguji joint hipotesa keseluruhan dan bersamama pengaruh variabel dependen terhadap variabel independent. Apabila nilai F hitung  $\leq$  F tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara simultan (Ho diterima). Sebaliknya, Apabila nilai F hitung  $>$  F tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara simultan (Ho ditolak).<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid., 98.

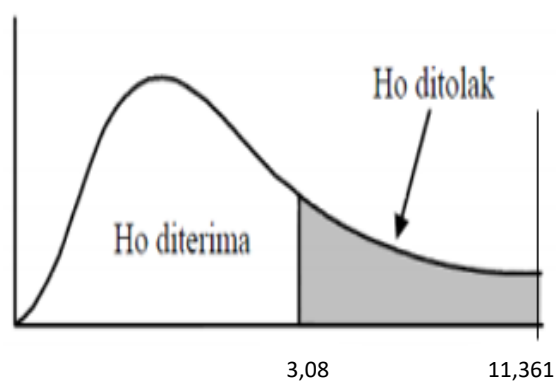
**Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik F****ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	160.274	2	80.137	11.361	.000 <sup>a</sup>
Residual	797.070	113	7.054		
Total	957.344	115			

a. Predictors: (Constant), DD, PAD

b. Dependent Variable: IPM

Dari hasil output SPSS uji simultan (Uji F) di atas, nilai Signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan nilai F hitung sebesar 11,361. Sementara itu, nilai F tabel =  $F(k ; n-k) = F(2 ; 114) = 3,08$ . F hitung ( $11,361 > 3,08$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa berpengaruh secara simultan atau Bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil uji F dapat digambarkan dalam kurva sebagai berikut :

**Gambar 4. 4 Kurva F**

#### 4.6.2 Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji parsial dapat dilakukan dengan membandingkan antara  $t_{\text{hitung}}$  dengan  $t_{\text{tabel}}$ . Apabila nilai  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , atau  $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependen*). Jadi, hipotesis dapat diterima/terbukti. Sebaliknya, Jika  $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ , atau  $-t_{\text{hitung}} \geq -t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependen*). Jadi, hipotesis dapat ditolak/tidak terbukti.<sup>83</sup>

**Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	70.578	1.145		61.655	.000
PAD	8.571E-12	.000	.285	3.256	.001
DD	-1.269E-11	.000	-.353	-4.036	.000

a. Dependent Variable: IPM

Berdasarkan hasil output spss uji parsial (uji t) dapat dilihat bahwa :

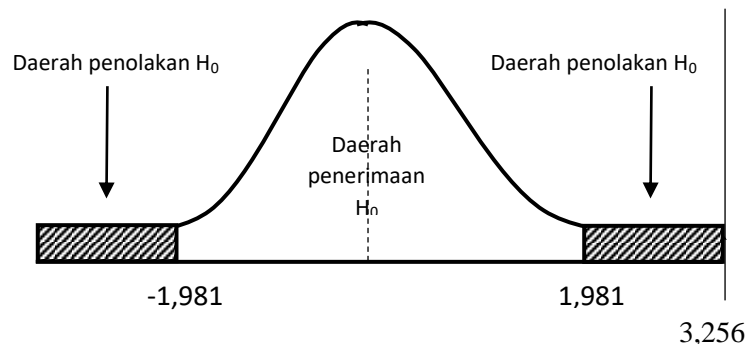
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari hasil output SPSS uji T di atas, nilai Signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar  $0,001 < 0,05$ . Sedangkan nilai  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 3,256 dan nilai  $t_{\text{tabel}} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,025;113) = 1,981$ . Sehingga nilai  $t_{\text{hitung}} (3,256) > t_{\text{tabel}} (1,981)$ . Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara

<sup>83</sup> Ibid., 99.

Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.  
 Hasil uji F dapat digambarkan dalam kurva sebagai berikut :

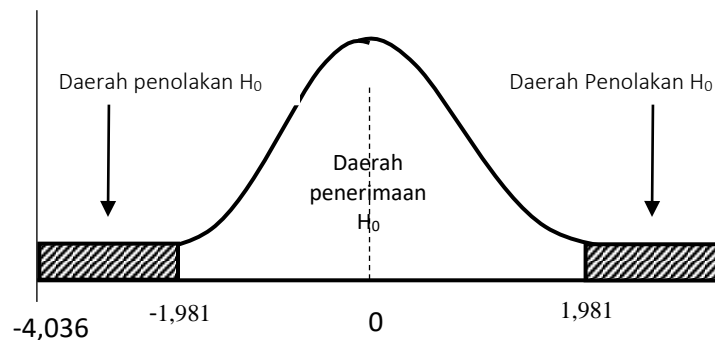
**Gambar 4. 5 Kurva T Variabel Pendapatan Asli Daerah**



b) Dana Desa (DD)

Dari hasil output SPSS uji parsial (Uji T) di atas, nilai Signifikansi variabel Dana Desa sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan nilai t hitung sebesar -4,036 dan nilai t tabel =  $t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,025;113) = -1,981$ . Sehingga nilai -t hitung (-4,036) < -t tabel (-1,981). Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil uji t dapat digambarkan dalam kurva sebagai berikut :

**Gambar 4. 6 Kurva T Variabel Dana Desa**



#### 4.7 Koefisien Determinasi

Koefisien determinansi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan variabel dependen (X) dalam menjelaskan variasi variabel independent (Y).<sup>84</sup>

**Tabel 4. 11 Hasil Uji Koofisien Determinansi**

##### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.409 <sup>a</sup>	.167	.153	2.65588

a. Predictors: (Constant), DD, PAD

Dari tampilan output di atas, nilai  $R^2$  sebesar 0,167. Artinya, 16,7% variasi Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan oleh variasi variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa. Sedangkan variasi lainnya ( $100\% - 16,7\% = 83,3\%$ ) dijelaskan oleh sebab sebab yang lain diluar model.

#### 4.8 Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten di Jawa Tengah. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah sebesar  $0,001 < 0,05$  dengan

---

<sup>84</sup> Ibid., 97.

nilai  $t$  hitung (3,256) >  $t$  tabel (1,981) yang berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya, jika Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat, begitu pula sebaliknya. Maka hipotesis H1 diterima.

Peran Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan salah satu tolak ukur kemampuan ekonomi suatu daerah. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan keberhasilan daerah dalam mengelola sumber dayanya sehingga menjadi sumber pembiayaan berupa Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka diharapkan semakin kecil tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai keperluan atau kebutuhan Pemerintah Daerah seperti halnya penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah. Maka Pemerintah harus selalu berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam yang dimilikinya. Walaupun demikian, upaya tersebut juga harus memperhatikan kemampuan daerah baik sumber daya maupun pengelolaannya. Hal tersebut dikarenakan resiko *trade off* yaitu sebuah keinginan yang menggebu untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah namun menjadi *disinsentif* yang dapat mematikan potensi (investasi) daerah.<sup>85</sup>

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hastu Sarkoro dan Zulfikar (2016) yang menyatakan bahwa Pendaatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian lain juga menyatakan hasil yang sama seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu dan Ni Luh Supadmi (2016).

## 2. Pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

---

<sup>85</sup> Andriana Okta Fara Diba, Moehammad Fathorrazi, and Rafael Purtomo Somaji, "Pengaruh Kemiskinan, PDRB, Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium* 2, no. 1 (2018): 18.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil uji secara parsial menunjukkan hasil bahwa nilai taraf signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai -t hitung  $(-4,036) < -t$  tabel  $(-1,981)$ . Artinya, Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jika Dana Desa meningkat maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya. Maka hipotesis H2 ditolak.

Hal tersebut bertentangan dengan teori yang ada, dimana Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Ketidaksihesuaian ini dapat disebabkan oleh pengelolaan Dana Desa yang belum disiplin, efektif, dan efisien. Hal tersebut dibuktikan dengan masih rendahnya belanja pembangunan, belanja pegawai yang tinggi, dan rasio pajak terhadap PDRB yang rendah.<sup>86</sup> Masih kurangnya tingkat efektifitas Dana Desa juga tercermin dalam sistem prosedur pemberian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dirasa masih belum ideal untuk perkembangan desa. Regulasi UU Desa mengatur penyaluran dana desa kedalam beberapa tahap. Berdasarkan PMK 50 tahun 2020 dana desa disalurkan dengan porsi 40%-40%-20% untuk desa regular dan berdasarkan PMK 101 tahun 2020 dengan porsi 60%-40% untuk desa mandiri.<sup>87</sup> Pengalokasian Dana Desa hanya dapat diterima setiap beberapa bulan sekali padahal anggaran tersebut dibutuhkan setiap bulannya seperti halnya untuk biaya operasional aparatur Pemerintahan Desa.<sup>88</sup> Selain itu, masih banyak terjadi kasus penyelewengan terhadap penggunaan Dana Desa. Hal tersebut tercermin dengan masih banyaknya aparatur desa yang

---

<sup>86</sup> Athika Rahma, *Sri mulyani Akui Pengelolaan Dana Desa Masih Belum Efektif*, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4562131/sri-mulyani-akui-pengelolaan-dana-desa-masih-belum-efektif> pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 06.30 WIB.

<sup>87</sup> Djpb Kemenkeu RI, *Kebijakan Dana Desa Tahun 2021*, didownload dari [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id) pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 05.00 WIB.

<sup>88</sup> Alexander Haryanto, *Prosedur Pemberian Dana Desa Dinilai Belum Efektif*, diakses dari <https://tirto.id/prosedur-pemberian-dana-desa-dinilai-belum-efektif-cwhJ> pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 20.45 WIB.



terjerat kasus penggunaan Dana Desa.<sup>89</sup> Kasus penyelewengan dana desa oleh aparatur desa di Jawa Tengah dibuktikan dengan terungkapnya beberapa kasus penyalahgunaan dana desa oleh para oknum aparatur desa, diantaranya mantan Kepala Desa Gemulak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada tahun 2020, mantan Kepala Desa Wonosido Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020,<sup>90</sup> mantan Kepala Desa Bangsri Kabupaten Brebes pada tahun 2019,<sup>91</sup> 3 oknum kepala desa di Kabupaten Kudus pada tahun 2021,<sup>92</sup> dan lain-lain.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian Yulfan Arif N, dkk (2019) yang mengemukakan jika Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian lain juga menunjukkan hasil yang serupa seperti penelitian Bestari Ayu Dewanti (2020) yang mengemukakan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena Dana Desa belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, efektif, dan efisien. Hal tersebut dapat disebabkan kemungkinan pembagian Dana Desa yang kurang merata dan kurang tepat sasaran serta kemungkinan penyalahgunaan pemakaian Dana Desa. Sementara itu peneliti lain menyatakan hasil yang sebaliknya, Otong Suhyanto, et.all (2020) mengemukakan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Rimawan & Fenny (2019) juga menyatakan hasil yang sama bahwa Alokasi Dana Desa mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

---

<sup>89</sup> Setiady Dwi, *300 Kades Terjerat Kasus Penggunaan Dana Desa*, diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04124302/300-kades-terjerat-kasus-penggunaan-dana-des?page=all> pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 21.30 WIB.

<sup>90</sup> Cikwan Suwandi, *Korupsi Dana Desa, 2 Kades di Jateng Ditangkap*, diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/daerah/ObzM9jxN-korupsi-dana-des-2-kades-di-jateng-ditangkap> diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.31 WIB.

<sup>91</sup> Imam Suropto, *Kades di Brebes Ditahan Gegara Tilap Dana Desa Sebesar Rp. 101 Juta*, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5854166/kades-di-brebes-ditahan-gegara-tilap-dana-des-rp-101-juta> pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.50 WIB.

<sup>92</sup> Puthut Dwi Putrando, *3 Mantan Kades di Kudus Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/081150678/3-mantan-kades-di-kudus-ditetapkan-jadi-tersangka-korupsi-dana-des> pada tanggal 23 Desember pukul 14.30 WIB.

### 3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil uji secara simultan menunjukkan hasil bahwa nilai taraf signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai F hitung  $(11,361) > F$  tabel  $(3,08)$  yang berarti Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Maka, hipotesis H3 diterima. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada, dimana Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2017-2020 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji yang menunjukkan bahwa nilai sig 0,001 yang nilainya kurang dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,256.
2. Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji yang menunjukkan bahwa nilai sig 0,000 yang nilainya kurang dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar -4,036.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa secara simultan atau Bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji yang menunjukkan bahwa nilai sig 0,000 yang nilainya kurang dari 0,05. Sedangkan nilai F hitung sebesar 11,361.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Dalam penulisan, peneliti sadar bahwa masih terdapat banyak keterbatasan. Maka diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan oleh pembaca dan peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan yang dimaksud diantaranya :

- a. Peneliti hanya melakukan penelitian terhadap dua variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- b. Peneliti hanya mengkaji variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia dan tidak memisahkan per bidang sesuai dimensi dalam Indeks Pembangunan Manusia.

### 5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan serta melihat keterbatasan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menjawab keterbatasan -keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini. Berikut merupakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

- 1) Untuk Pemerintah Pusat, dapat membuat kebijakan untuk meningkatkan dana TKDD khususnya Dana Desa serta kebijakan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana desa untuk menghindari penyalahgunaan dana desa.
- 2) Untuk Pemerintah Daerah, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan sumber daya yang dimiliki daerah sehingga dapat memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menurunkan tingkat ketergantungan daerah terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat.
- 3) Untuk Pemerintah Desa, lebih mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa ke bidang-bidang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang Pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Pemerintah Desa diharapkan dapat menyelenggarakan program-program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan manusia.
- 4) Saran penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjelaskan per bidang sesuai dengan dimensi yang dimiliki Indeks Pembangunan Manusia seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan periode dan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Haryanto, *Prosedur Pemberian Dana Desa Dinilai Belum Efektif*, diakses dari <https://tirto.id/prosedur-pemberian-dana-desa-dinilai-belum-efektif-cwhJ> pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 20.45 WIB.
- Anggraini, Yusniah. *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia*. Jakarta: Indocamp, 2018.
- Athika Rahma, *Sri mulyani Akui Pengelolaan Dana Desa Masih Belum Efektif*, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4562131/sri-mulyani-akui-pengelolaan-dana-desa-masih-belum-efektif> pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 06.30 WIB.
- Beik, Irfan Syauqi. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Canda, Ida Ayu, and Ni Luh Supadmi. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia." *E-Jurnal Akuntansi* 15, no. 3 (2016): 5.
- Cikwan Suwandi, *Korupsi Dana Desa, 2 Kades di Jateng Ditangkap*, diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/daerah/ObzM9jxN-korupsi-dana-desa-2-kades-di-jateng-ditangkap> diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.31 WIB.
- Demak, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak 2017*. Demak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2017.
- Dewi, Novita. "Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau." *JOM Fekon* 4, no. 1 (2017): 872.
- Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/955/8/BAB%252011.pdf> pada tanggal 3 April 2020 pukul 01.19 WIB

Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html> pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 20.30 WIB.

Diba, Andriana Okta Fara, Moehammad Fathorrazi, and Rafael Purতোমো Somaji. “Pengaruh Kemiskinan, PDRB, Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur.” *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium* 2, no. 1 (2018).

Djpb Kemenkeu RI, *Kebijakan Dana Desa Tahun 2021*, didownload dari [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 05.00 WIB.

Duli, Nikolaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Fathurrahman, Ayie. “Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan.” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2020): 73–74.

Fitri, Ayu Laila. “Kesadaran Terhadap Nikmat Waktu Luang (Studi Ma’anil Hadith Riwayat Imam Al-Nasai Nomor Indeks 11800 Perspektif Psikologi Kepribadian).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.

Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Hanifa, Paramitha. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak 2018*. Demak: BPS Kabupaten Demak, 2018.

Imam Suropto, *Kades di Brebes Ditahan Gegara Tilap Dana Desa Sebesar Rp. 101 Juta*, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5854166/kades-di-brebes-ditahan-gegara-tilap-dana-desa-rp-101-juta> pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.50 WIB.

Irmayanti. “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan

- Ekonomi Di Kabupaten Polewari Mandar.” UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017-2020 diakses dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 13.30 WIB.
- Murniasih, Erny, and M. Syarif Mulyadi. “Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 12, no. 1 (2011): 57.
- Nadir, Sakinah. “Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 1.
- Nasir, Muhmmad Safar. “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah.” *Jurnal Dinamika Ekoomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 34.
- Novianto, Dwi. *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. Kalimantan Barat: Dermawati Press, 2019.
- Oktara, Larasati Prima. *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Pamilu, Galih. “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melek Huruf Perempuan Dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” Universitas Diponegoro, 2012.
- Prasetio, Tofan Wahyu Dwi. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Puthut Dwi Putrando, *3 Mantan Kades di Kudus Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/081150678/3-mantan-kades-di-kudus-ditetapkan-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa> pada tanggal 23

Desember pukul 14.30 WIB.

Putra, Rico, and Surya Hidayat. "Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi." *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 3, no. 4 (2016): 245.

Rahman. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Jeneponto (Perspektif Ekonomi Islam)." UIN Makassar, 2016.

Ramatullah, Rizky. "Islamic Human Development Index Di Kawasan Eksplorasi Tambang Batu Bara Di Batu Sopang Kalimantan Timur." Universitas Islam Indonesia, 2018.

Riviando, Adel, Henri Agustin, and Halmawati. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017)." *Jurnal Eksplorasi akuntansi* 1, no. 1 (2010).

Sabdo. "Konsep "Baladun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur" Sebagai Tujuan Akhir Proses Transformasi Sosial Islam." *At-Thariq* 1, no. 2 (2018): 3.

Salahuddin El Ayyubi, *Islam dan Indeks Pembangunan Manusia*, Dosen IE FEM IPB dan Peneliti Pusat Studi Bisnis dan ekonomi Syariah (CIBEST) IPB, diakses pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 12.50 WIB.

Sarkoro, Hastu, and Zulfikar. "Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Propinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014)." *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1, no. 1 (2016): 57.

Sasana, Hadi. "Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah." *Dinamika pembangunan* 3, no. 2 (2006): 147.



- . “Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 0, no. 1 (2009): 116.
- Septiarini, Maya Masita, and Sri Herianingrum. “Analisis I-HDI (Islamic-Human Development Index) Di Jawa Timur.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 5 (2017): 384.
- Setiady Dwi, *300 Kades Terjerat Kasus Penggunaan Dana Desa*, diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04124302/300-kades-terjerat-kasus-penggunaan-dana-desa?page=all> pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 21.30 WIB.
- Siagan, Altito R. “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Propinsi Jawa Barat).” Universitas Diponegoro, 2010.
- Siregar, Shofiyan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual&SPSS*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhyanto, Otong, Bambang Juanda, Akhmad Fauzi, and Ernan Rustiadi. “Pengaruh Dana Transfer Dana Desa Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 4, no. 3 (2020): 285.
- Tengah, Badan Pusat Statistik Jawa. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2021*. Semarang: BPS Jawa Tengah, 2021.
- Wirawan, M., and Fenny Aryani. “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaniora* 9, no. 3 (2019): 1.
- Wulandai, Phaurela Artha, and Emy Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Yusuf, M. Afrizal. "Pengaruh Dana Transfer Daerah Dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018." UIN Walisongo, 2019.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Tabulasi Data

<b>KABUPATEN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>IPM</b>	<b>PAD</b>	<b>DD</b>
Kab. Cilacap	2017	68.9	645815098000	232084054000
Kab. Cilacap	2018	69.56	497353613000	240787259000
Kab. Cilacap	2019	69.98	574276794000	286955948800
Kab. Cilacap	2020	69.95	495407770000	293893896000
Kab. Sukoharjo	2017	75.56	464567410000	123576433000
Kab. Sukoharjo	2018	76.07	433485481000	126076256000
Kab. Sukoharjo	2019	76.84	458742224000	146662487000
Kab. Sukoharjo	2020	76.98	332207075000	144973519600
Kab. Purbalingga	2017	67.72	355859003000	191224910000
Kab. Purbalingga	2018	68.41	282679019000	199934262000
Kab. Purbalingga	2019	68.99	305996806000	237221605000
Kab. Purbalingga	2020	68.97	284009239000	245675204000
Kab. Banyumas	2017	70.75	619701628000	255734553000
Kab. Banyumas	2018	71.3	648326914000	295876047000
Kab. Banyumas	2019	71.96	686805512000	360743521000
Kab. Banyumas	2020	71.98	729892819000	378545183000
Kab. Kebumen	2017	68.29	443608863000	359739251800
Kab. Kebumen	2018	68.8	351965057000	350023637000
Kab. Kebumen	2019	69.6	409163433000	395411358600
Kab. Kebumen	2020	69.81	417693691000	405025869000
Kab. Purworejo	2017	71.31	298606496000	355968663000
Kab. Purworejo	2018	71.87	278952386000	325017443600
Kab. Purworejo	2019	72.5	280396156000	366917898000
Kab. Purworejo	2020	72.68	326571675000	363993225000
Kab. Wonosobo	2017	66.89	309170756000	191496626000

Kab. Wonosobo	2018	67.81	226819478000	184414648000
Kab. Wonosobo	2019	68.27	238371743000	212114096000
Kab. Wonosobo	2020	68.22	224697827000	217226851000
Kab. Boyolali	2017	72.64	388014880000	207823645000
Kab. Boyolali	2018	73.22	342957214000	192998474000
Kab. Boyolali	2019	73.8	395431863000	219802085000
Kab. Boyolali	2020	74.25	369369271000	216981458000
Kab. Magelang	2017	68.39	403561237000	289613899000
Kab. Magelang	2018	69.11	325089093000	325360832000
Kab. Magelang	2019	69.87	417178100000	383071777000
Kab. Magelang	2020	69.87	406095299000	391044107982
Kab. Klaten	2017	74.25	371520334000	311087446200
Kab. Klaten	2018	74.79	373770434000	320940593000
Kab. Klaten	2019	75.29	311648401000	374660994000
Kab. Klaten	2020	75.56	304546856000	380846600500
Kab. Banjarnegara	2017	65.86	297485382000	214470940000
Kab. Banjarnegara	2018	66.54	235994436000	222775782000
Kab. Banjarnegara	2019	67.34	257700650000	262654461000
Kab. Banjarnegara	2020	67.45	263413965000	265128597000
Kab. Wonogiri	2017	68.66	333840435000	198745821000
Kab. Wonogiri	2018	69.37	269032428000	196188133000
Kab. Wonogiri	2019	69.98	287221630000	227393914000
Kab. Wonogiri	2020	70.25	252340642000	224649959500
Kab. Karanganyar	2017	75.22	415142563000	133065748000
Kab. Karanganyar	2018	75.54	343156469000	138839437000
Kab. Karanganyar	2019	75.89	387763013000	160000995000
Kab. Karanganyar	2020	75.86	357146402000	166130456001
Kab. Pemasang	2017	65.04	425893267000	191002083000
Kab. Pemasang	2018	65.67	300481887000	249322556000
Kab. Pemasang	2019	66.32	350559140000	301814036000

Kab. Pemasang	2020	66.32	309060518000	327255484000
Kab. Sragen	2017	72.4	404555766000	160952188596
Kab. Sragen	2018	72.96	334303284000	146148323000
Kab. Sragen	2019	73.43	368325800000	168044095000
Kab. Sragen	2020	73.95	338220314000	171103129000
Kab. Blora	2017	67.52	280047450000	214102024000
Kab. Blora	2018	67.95	203166113000	229733837000
Kab. Blora	2019	68.65	264338953000	268253846000
Kab. Blora	2020	68.84	236965596000	267071340000
Kab. Pati	2017	70.12	428374750000	317453410000
Kab. Pati	2018	70.71	383912843000	365454541000
Kab. Pati	2019	71.35	363997154000	417038558000
Kab. Pati	2020	71.77	351859894000	426380834000
Kab. Grobogan	2017	68.87	440456236000	229625434000
Kab. Grobogan	2018	69.32	315743176000	248195231000
Kab. Grobogan	2019	69.86	344559032000	289687819000
Kab. Grobogan	2020	69.87	332001228000	302016826500
Kab. Kudus	2017	73.84	366031204000	103687281000
Kab. Kudus	2018	74.58	337364609000	117344518400
Kab. Kudus	2019	74.94	343824123000	136723311800
Kab. Kudus	2020	75	378701780000	147823461000
Kab. Temanggung	2017	68.34	308466748000	207451723000
Kab. Temanggung	2018	68.83	252019935000	213042611000
Kab. Temanggung	2019	69.56	278313775000	241944648000
Kab. Temanggung	2020	69.57	266913818000	247881825000
Kab. Semarang	2017	73.2	417417849000	165688573000
Kab. Semarang	2018	73.61	383475678000	157084768000
Kab. Semarang	2019	74.14	429011081000	181931854000
Kab. Semarang	2020	74.1	479870281000	184666676000
Kab. Demak	2017	70.41	309612407000	211595493000

Kab. Demak	2018	71.26	342324870000	229565688000
Kab. Demak	2019	71.87	407400541000	276950857000
Kab. Demak	2020	72.22	404373956000	284463387000
Kab. Batang	2017	67.35	219807129000	190962224000
Kab. Batang	2018	67.86	237547973000	168403538000
Kab. Batang	2019	68.42	245836087000	192327469000
Kab. Batang	2020	68.65	246398163000	193031345000
Kab. Kendal	2017	70.62	404911989000	212767017465
Kab. Kendal	2018	71.28	335842483000	215090043000
Kab. Kendal	2019	71.97	350500850000	240437047000
Kab. Kendal	2020	72.29	425302414000	248445837000
Kab. Pekalongan	2017	68.4	305394299000	222535590000
Kab. Pekalongan	2018	68.97	311288144000	227517071400
Kab. Pekalongan	2019	69.71	341344415000	259142008800
Kab. Pekalongan	2020	69.63	466818350000	263397106000
Kab. Jepara	2017	70.79	331060969000	158765096000
Kab. Jepara	2018	71.38	369330455000	190273424000
Kab. Jepara	2019	71.88	384979093000	234090663000
Kab. Jepara	2020	71.99	386441887000	247118045000
Kab. Tegal	2017	66.44	375531165000	234026299000
Kab. Tegal	2018	67.33	372282676000	282703162997
Kab. Tegal	2019	68.24	436003393000	340958368997
Kab. Tegal	2020	68.39	450742220000	358311953000
Kab. Brebes	2017	64.86	528836444000	270922338000
Kab. Brebes	2018	65.68	346907973000	344197496000
Kab. Brebes	2019	66.12	379091299000	441009459000
Kab. Brebes	2020	66.11	398649681000	492478504000
Kab. Rembang	2017	68.95	318049266000	228013715000
Kab. Rembang	2018	69.46	305676436000	229010130000
Kab. Rembang	2019	70.15	308445489000	258436412000

Kab. Rembang	2020	70.02	307258622000	260523814000
--------------	------	-------	--------------	--------------

## Lampiran 2. Tabel DW-test, T-test & F-test

### Tabel Durbin Watson

	k=1		k=2		k=3		k=4	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
90	1.6345	1.6794	1.6119	1.7026	1.5889	1.7264	1.5656	1.7508
91	1.6366	1.6810	1.6143	1.7040	1.5915	1.7275	1.5685	1.7516
92	1.6387	1.6826	1.6166	1.7053	1.5941	1.7285	1.5713	1.7523
93	1.6407	1.6841	1.6188	1.7066	1.5966	1.7295	1.5741	1.7531
94	1.6427	1.6857	1.6211	1.7078	1.5991	1.7306	1.5768	1.7538
95	1.6447	1.6872	1.6233	1.7091	1.6015	1.7316	1.5795	1.7546
96	1.6466	1.6887	1.6254	1.7103	1.6039	1.7326	1.5821	1.7553
97	1.6485	1.6901	1.6275	1.7116	1.6063	1.7335	1.5847	1.7560
98	1.6504	1.6916	1.6296	1.7128	1.6086	1.7345	1.5872	1.7567
99	1.6522	1.6930	1.6317	1.7140	1.6108	1.7355	1.5897	1.7575
100	1.6540	1.6944	1.6337	1.7152	1.6131	1.7364	1.5922	1.7582
101	1.6558	1.6958	1.6357	1.7163	1.6153	1.7374	1.5946	1.7589
102	1.6576	1.6971	1.6376	1.7175	1.6174	1.7383	1.5969	1.7596
103	1.6593	1.6985	1.6396	1.7186	1.6196	1.7392	1.5993	1.7603
104	1.6610	1.6998	1.6415	1.7198	1.6217	1.7402	1.6016	1.7610
105	1.6627	1.7011	1.6433	1.7209	1.6237	1.7411	1.6038	1.7617
106	1.6644	1.7024	1.6452	1.7220	1.6258	1.7420	1.6061	1.7624
107	1.6660	1.7037	1.6470	1.7231	1.6277	1.7428	1.6083	1.7631
108	1.6676	1.7050	1.6488	1.7241	1.6297	1.7437	1.6104	1.7637
109	1.6692	1.7062	1.6505	1.7252	1.6317	1.7446	1.6125	1.7644
110	1.6708	1.7074	1.6523	1.7262	1.6336	1.7455	1.6146	1.7651
111	1.6723	1.7086	1.6540	1.7273	1.6355	1.7463	1.6167	1.7657
112	1.6738	1.7098	1.6557	1.7283	1.6373	1.7472	1.6187	1.7664
113	1.6753	1.7110	1.6574	1.7293	1.6391	1.7480	1.6207	1.7670
114	1.6768	1.7122	1.6590	1.7303	1.6410	1.7488	1.6227	1.7677
115	1.6783	1.7133	1.6606	1.7313	1.6427	1.7496	1.6246	1.7683
116	1.6797	1.7145	1.6622	1.7323	1.6445	1.7504	1.6265	1.7690
117	1.6812	1.7156	1.6638	1.7332	1.6462	1.7512	1.6284	1.7696
118	1.6826	1.7167	1.6653	1.7342	1.6479	1.7520	1.6303	1.7702
119	1.6839	1.7178	1.6669	1.7352	1.6496	1.7528	1.6321	1.7709
120	1.6853	1.7189	1.6684	1.7361	1.6513	1.7536	1.6339	1.7715

Tabel F Statistik

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83



Tabel T Statistik

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

### Lampiran 3. Hasil Uji Statistik

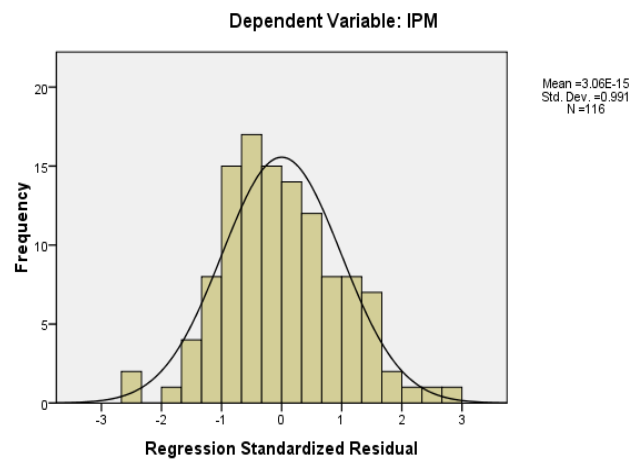
#### *Deskriptif Statistik*

##### Descriptive Statistics

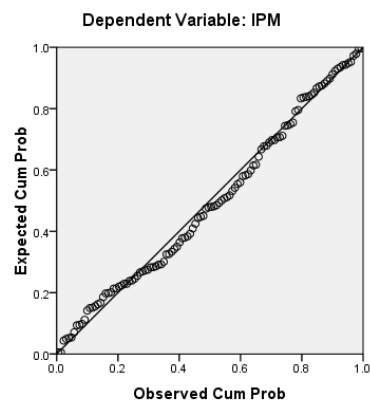
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	116	5.27E11	2.03E11	7.30E11	3.6296E11	9.58220E10
DD	116	3.89E11	1.04E11	4.92E11	2.5099E11	8.02179E10
IPM	116	12.12	64.86	76.98	70.5026	2.88526
Valid N (listwise)	116					

#### Uji Normalitas

##### Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			116
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.63268714
Most Extreme Differences	Absolute		.054
	Positive		.054
	Negative		-.045
Kolmogorov-Smirnov Z			.586
Asymp. Sig. (2-tailed)			.883
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.865 <sup>c</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.857
		Upper Bound	.874
a. Test distribution is Normal.			

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

## Uji Multikolinieritas

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model			DD	PAD
1	Correlations	DD	1.000	-.190
		PAD	-.190	1.000
	Covariances	DD	9.888E-24	-1.571E-24
		PAD	-1.571E-24	6.930E-24

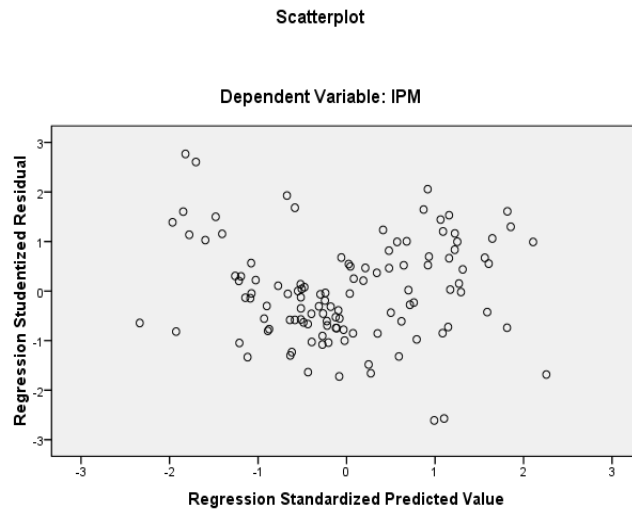
a. Dependent Variable: IPM

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	70.578	1.145		61.655	.000		
	PAD	8.571E-12	.000	.285	3.256	.001	.964	1.037
	DD	-1.269E-11	.000	-.353	-4.036	.000	.964	1.037

a. Dependent Variable: IPM

## Uji Heteroskedastisitas



Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.319	.687		3.375	.001
	PAD	1.310E-13	.000	.008	.083	.934
	DD	-1.080E-12	.000	-.055	-.573	.568

a. Dependent Variable: AbsUt

## Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.409 <sup>a</sup>	.167	.153	2.65588	.960

a. Predictors: (Constant), DD, PAD

b. Dependent Variable: IPM

## Uji Chochrance Orcutt

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.038	.210		.179	.858
	Lag_Res1	.508	.080	.514	6.375	.000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.309 <sup>a</sup>	.095	.079	2.24527	1.808

a. Predictors: (Constant), Lag\_x2, Lag\_x1

b. Dependent Variable: Lag\_y

## Analisis Regresi Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	70.578	1.145		61.655	.000
	PAD	8.571E-12	.000	.285	3.256	.001
	DD	-1.269E-11	.000	-.353	-4.036	.000

a. Dependent Variable: IPM

## Uji F Statistik

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	160.274	2	80.137	11.361	.000 <sup>a</sup>
	Residual	797.070	113	7.054		
	Total	957.344	115			

a. Predictors: (Constant), DD, PAD

b. Dependent Variable: IPM

## Uji T Statistik

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	70.578	1.145		61.655	.000
	PAD	8.571E-12	.000	.285	3.256	.001
	DD	-1.269E-11	.000	-.353	-4.036	.000

a. Dependent Variable: IPM

## Koefisien Determinan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.409 <sup>a</sup>	.167	.153	2.65588

a. Predictors: (Constant), DD, PAD

## Lampiran 4. Persetujuan Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JL. PEMUDA NO. 2, SEMARANG 50138; TELEPON (024) 3555852, 3515989;  
 FAKSIMILE (024) 3544255, 3545877; SUREL.KANWIL.JATENG@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN  
 WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWILJATENG

Nomor : S-208/WPB.14/2021 01 Februari 2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : Satu Berkas  
 Hal : Persetujuan Izin Penelitian Mahasiswa a.n. Hani'atul Dhikriyah

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang nomor B-210/Un.10.5/D1/PP.00.9/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 hal Permohonan Ijin Pra Riset / Penelitian, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Kami setuju dan siap memfasilitasi data untuk penelitian mahasiswa atas nama Hani'atul Dhikriyah, sebagaimana dimaksud dalam Surat di atas.
2. Pelaksanaan pemberian data, ataupun interaksi dengan mahasiswa dimaksud, akan kami lakukan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan Pandemi Covid-19.
3. Selanjutnya, dimohon agar semua data dan informasi yang diperoleh, digunakan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk disebarluaskan sebelum mendapatkan izin resmi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
 Jenderal Perbendaharaan Provinsi  
 Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik  
 Sulaimansyah

Tembusan:  
 Sekretaris Direktorat Jenderal





## Lampiran 5. Biodata Mahasiswa

### DATA DIRI

Nama : Hani'atul Dhikriyah  
Tempat & Ttgl. Lahir : Demak , 12 Desember 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Surodadi, Rt 04/01, Sayung, Demak, Jawa Tengah  
Email : hanikdhikriyah@gmail.com  
No. Telp/HP : 082145736567

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri Surodadi 1 Lulus Tahun 2011 (Berijazah)
2. MTs Negeri Karang Tengah Lulus Tahun 2014 (Berijazah)
3. SMA Negeri 1 DEMAK Lulus Tahun 2017 (Berijazah)